



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka perwujudan *good governance*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024.

Berdasarkan dinamika perkembangan yang terjadi, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh Kebijakan, Program, Kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk aspek keuangan.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam upaya mewujudkan *good governance*.

Sarilamak, Februari 2025
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota

AFRI EFENDI, S.Pd, SD, MM
NIP. 196803281992101001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Wewenang	2
C. Dasar Hukum	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan....	7
B. Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja.....	14
B. Hasil Pengukuran Kinerja	15
C. Analisis dan Capaian Kinerja	16
D. Realisasi Anggaran	52
E. Tindak Lanjut Rekomendasi APIP Atas Review LKjIP Tahun 2023..	61
BAB IV PENUTUP.....	64
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.....	3
---	---

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026	9
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2024.....	12
Tabel 2.3	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	13
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja	14
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024	15
Tabel 3.3	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategi 1	17
Tabel 3.4	Penyelenggaraan festival seni dan budaya pada tahun 2024	18
Tabel 3.5	Pelaksanaan Event dan promosi seni dan budaya pada tahun 2024	20
Tabel 3.6	Kelompok seni dan budaya yang aktif pada tahun 2024	22
Tabel 3.7	Jumlah benda cagar budaya dan pelestarian benda/situs	24
Tabel 3.8	Data Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	26
Tabel 3.9	Realisasi Program dan Kegiatan Pelaksanaan Indikator Kinerja Tujuan Optimalnya Pendidikan dan Fungsi Kelembagaan Agama, Adat dan Budaya	32
Tabel 3.10	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategi 2	34
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategi 2 dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2024	35
Tabel 3.12	Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pendidikan ..	38
Tabel 3.13	Realisasi Program/kegiatan yang mendukung Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah	41
Tabel 3.14	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 3	47
Tabel 3.15	Rincian hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pendidikan Tahun 2024	48
Tabel 3.16	Realisasi Program/kegiatan yang mendukung Pelaksanaan Indikator Kinerja Tujuan Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	49
Tabel 3.17	Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024.....	52
Tabel 3.18	Rincian Alokasi Anggaran dan Realisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024	53

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024	16
Grafik 3.2 Realisasi Persentase Pemberlakuan norma adat yang berlaku	17
Grafik 3.3 Festival Keseniaan dan Kebudayaan yang Diselenggarakan pada Tahun 2024	19
Grafik 3.4 Event dan Promosi Keseniaan dan Kebudayaan yang Dilaksanakan pada Tahun 2024	20
Grafik 3.5 Kelompok Keseniaan dan Kebudayaan yang Aktif pada Tahun 2024	23
Grafik 3.6 Jumlah benda cagar budaya dan pelestarian benda/situs	25
Grafik 3.7 Persentase benda/situs yang dilestarikan	25
Grafik 3.8 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategi 2.....	34
Grafik 3.9 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategi 2 dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dalam penyusunan laporan kinerja diperlukan yaitu pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bagian rutin yang dilaksanakan setiap tahun dengan mengacu pada penerapan Reformasi Birokrasi yang akuntabel dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila perencanaan yang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah. Atas dasar tersebut, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota selaku unsur pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.

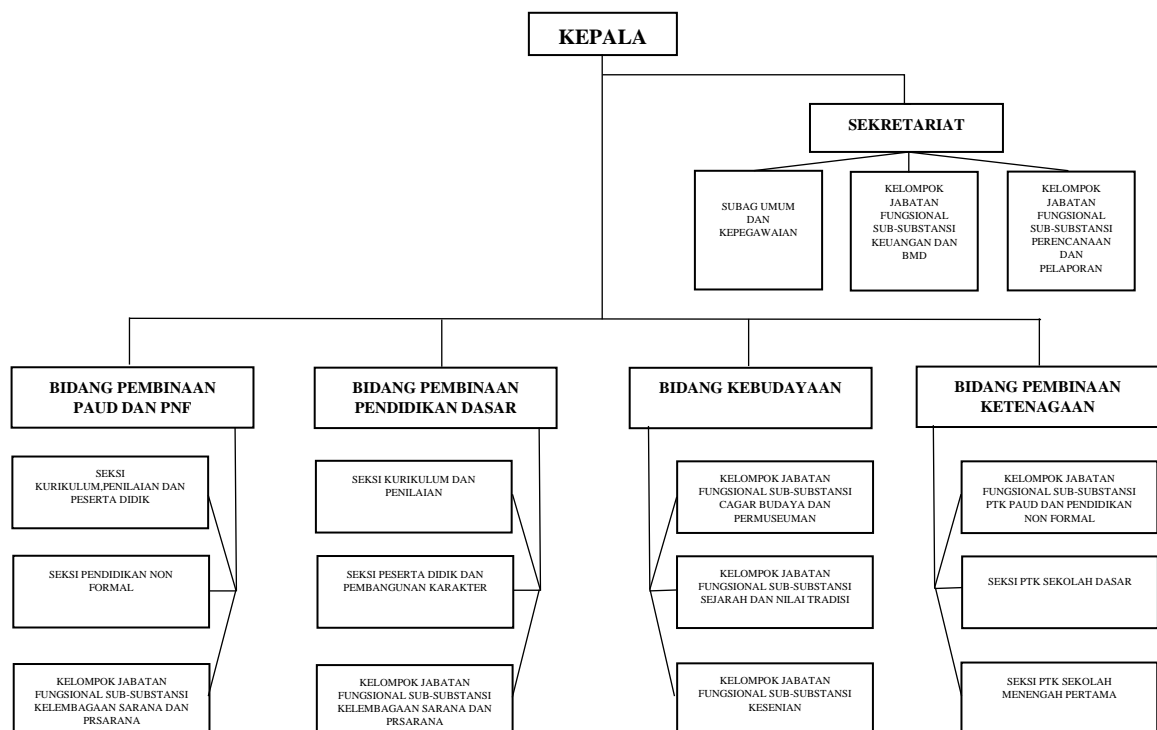
B. Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Urusan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pembagian urusan pemerintahan kabupaten bidang Pendidikan dan kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
- Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
- Pelaksana evaluasi dan pelaporan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
- Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota



C. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 196 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2016 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima puluh Kota Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 108);
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
22. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024.

Rencana strategis ini akan dijadikan pedoman bagi semua pihak dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah tertuang di dalam rencana strategis tersebut yang akan dituangkan ke dalam rencana kerja (Renja) yang dibuat setiap tahunnya. Rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disusun dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 – 2026.

Adapun visi Kabupaten Lima Puluh Kota yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah **MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH**

Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional
3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Misi pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan Pendidikan dan Kebudayaan yaitu misi ke satu (1) : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan, dengan tujuannya adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan sasaran Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan Masyarakat.
2. Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara',syarak basandi Kitabullah, dengan sasaran pembangunan Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya.

Program-program di Dinas Pendidikan yang akan mendukung misi ke satu yaitu:

1. Program Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Program pengembangan Kebudayaan
4. Program Pengembangan Keseniaan Tradisional
5. Program Pembinaan Sejarah
6. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
7. Program Pengelolaan Permuseuman

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	Indeks ABS SBK	Meningkatkan kualitas pengembangan Kebudayaan	Persentase pemberlakuan norma adat yang berlaku	NA	2,53	46,83	77,21	89,87	100
2.	Meningkatkan Kualitas dan akses Pendidikan	Persentase Peningkatan kualitas dan akses Pendidikan	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	8,16	8,23	8,30	8,37	8,44	8,52
				Harapan Lama Sekolah	13,48	13,76	13,85	14,13	14,32	14,50
3.	Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase peningkatan nilai akuntabilitas	Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja keuangan dan Reformasi Birokrasi Dinas	Nilai Indeks RB	B	B	B	B	B	B

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidikan dan Kebudayaan							

Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya.
2. Meningkatkan Kualitas dan akses Pendidikan.
3. Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Adapun sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

1. Meningkatnya kualitas pengembangan Kebudayaan.
2. Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan.
3. Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja keuangan dan Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Indikator Sasaran yang menjadi IKU Kepala Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

1. Rata-rata Lama Sekolah.
2. Harapan Lama Sekolah.
3. Persentase pemberlakuan norma adat yang berlaku.

Indikator sasaran yang menjadi IKU Organisasi Perangkat Daerah adalah:

1. Rata-rata Lama Sekolah.
2. Harapan Lama Sekolah.
3. Persentase pemberlakuan norma adat yang berlaku.
4. Nilai AKIP
5. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)
6. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

B. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis,

indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan /kegagalannya pada akhir periode. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lima Puluh Kota Tahun 2024.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	2	3		4	5
1.	Meningkatkan kualitas Pengembangan kebudayaan	1.	Persentase Pemberlakuan norma adat yang berlaku	%	77,21
2.	Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan	2.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,37
		3.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,13
3.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	4.	Nilai AKIP	Nilai	69,68 (B)
		5.	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai	64,17 (B)
		6.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	91,97

Program		Anggaran		Ket.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	455.455.476.429,-	
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp	112.591.970.040,-	
3.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp.	33.836.000,-	
3.	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp	1.958.758.600,-	
4.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp	475.000.000	
5.	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya		240.600.200,-	
6.	Program Pengelolaan Permuseuman		92999800	
	Jumlah Anggaran	Rp	542.292.404.804	

Tabel 2.3
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1.	Meningkatkan kualitas Pengembangan kebudayaan	1.	Persentase Pemberlakuan norma adat yang berlaku	%	77,21
2.	Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan	2.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,13
		3.	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,37
3.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	4.	Nilai AKIP	Nilai	69,68 (B)
		5.	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai	64,17 (B)
		6.	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	91,97

Program		Anggaran		Ket.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	455.455.476.429,-	
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp	112.591.970.040,-	
4.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp	33.836.000,-	
5.	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp	1.958.758.600,-	
6.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp	475.000.000,-	
7.	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp	240.600.200,-	
8.	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp.	92.999.800,-	
	Jumlah Anggaran	Rp	570.848.641.069,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisa penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

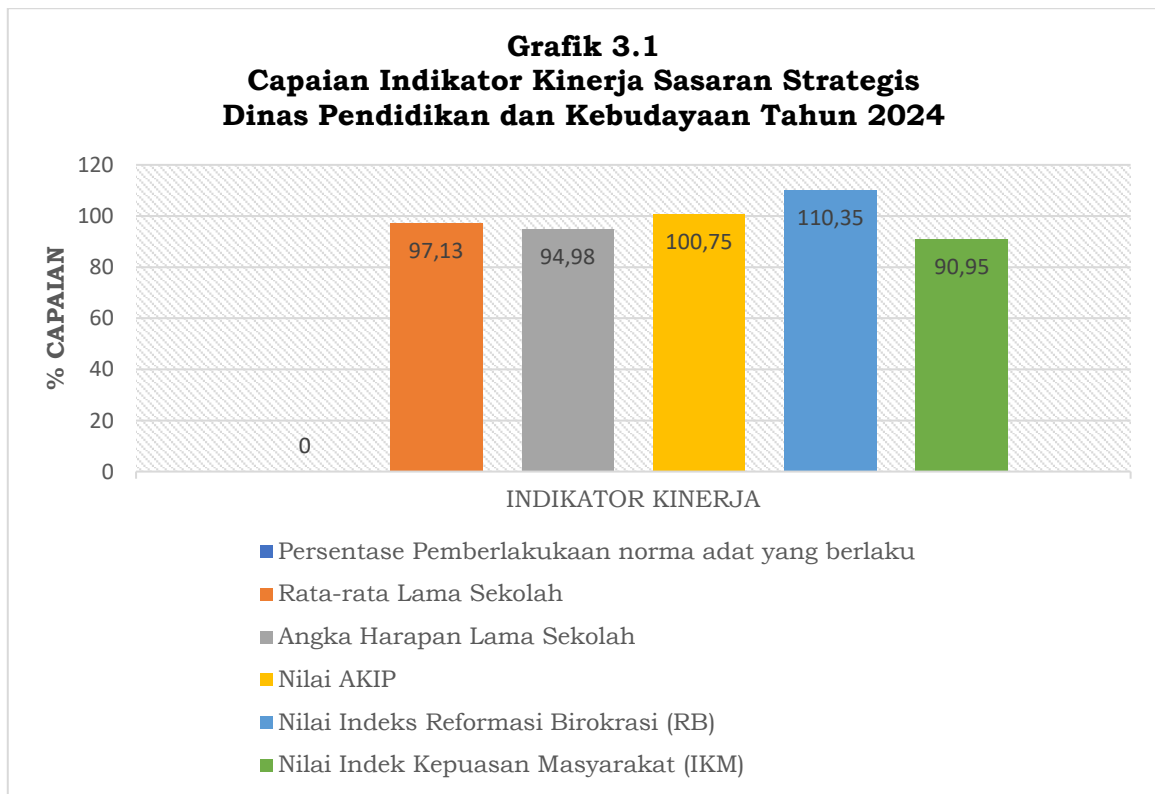
No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	<50%	Sangat Rendah

B. Hasil Pengukuran Kinerja

Pengukuran target kinerja berdasarkan pada sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dimana terdapat 3 Sasaran Strategis dan 5 Indikator Kinerja. Untuk lebih jelasnya realisasi dan persentase capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	IndikatorKinerja		Target	% Realisasi	% Capaian	Predikat
1.	Meningkatkan kualitas Pengembangan kebudayaan	1.	Persentase Pemberlakuan norma adat yang berlaku	77,21%	0 %	-	Sangat Rendah
2.	Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan	2.	Rata-rata Lama Sekolah	8,37 tahun	8,13 tahun	97,13	Sangat Tinggi
		3.	Angka Harapan Lama Sekolah	14,13 tahun	13,42 tahun	94,98	Sangat Tinggi
3.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	4.	Nilai AKIP	69,68 (B)	75,08 (BB)	107,75	Sangat Tinggi
		5.	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	64,17 (B)	70,81 (BB)	110,35	Sangat Tinggi
		6.	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,97	92,78	100,88	Sangat Tinggi



Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 untuk 5 indikator kinerja predikatnya adalah “sangat tinggi” sementara 1 indikator sangat rendah.

C. Analisis dan Capaian Kinerja

Analisis dan capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 – 2026 serta Rencana Kerja Tahun 2024. Hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2024 disajikan per sasaran strategis.

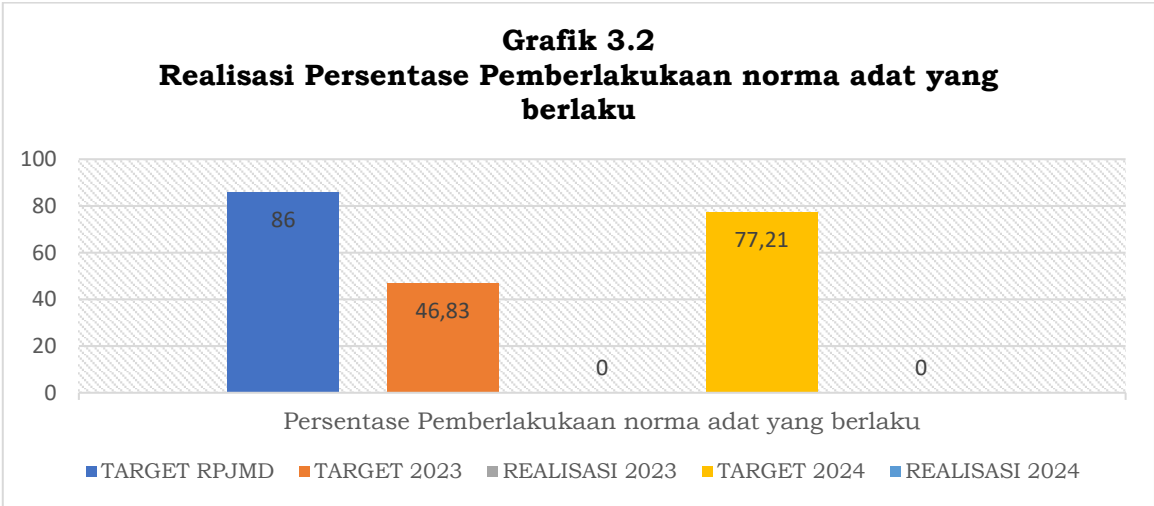
Sasaran Strategi 1

***Meningkatnya kualitas
Pengembangan kebudayaan***

Sasaran strategis 1 yaitu Meningkatkan kualitas Pengembangan kebudayaan dengan indikator kinerja adalah : Persentase Pemberlakuan norma adat yang berlaku.

Tabel 3.3
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategi 1

INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	KET.
Persentase Pemberlakuan norma adat yang berlaku	86	46,83	0	77,21	0	



Persentase Pemberlakuan Norma Adat yang berlaku adalah Persentase nagari yang sudah memberlakukan perda adat dibandingkan dengan Jumlah Nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Realisasi Persentase Pemberlakuan Norma Adat yang berlaku pada tahun 2024 masih 0%, karena sampai tahun 2024 Perda Adat belum ditetapkan. Hal ini disebabkan sampai tahun 2024 kesepakatan untuk substansi Ranperda yang berkaitan dengan adat ini belum ada, sehingga Ranperda yang diusulkan untuk dibahas belum ada.

Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Optimalnya Pendidikan dan fungsi Kelembagaan agama, adat dan budaya, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga dilaksanakan beberapa upaya untuk Meningkatnya pengembangan sejarah, kesenian dan kebudayaan.

Dalam rangka Meningkatkan pengembangan sejarah, kesenian dan kebudayaan, dilakukan beberapa kegiatan yang berguna untuk meningkatkan pelaksanaan event kesenian dan kebudayaan, meningkatkan pendataan terhadap kelompok seni dan budaya dan meningkatkan pengelolaan terhadap cagar budaya.

1. Meningkatkan pelaksanaan Event Kesenian dan Kebudayaan

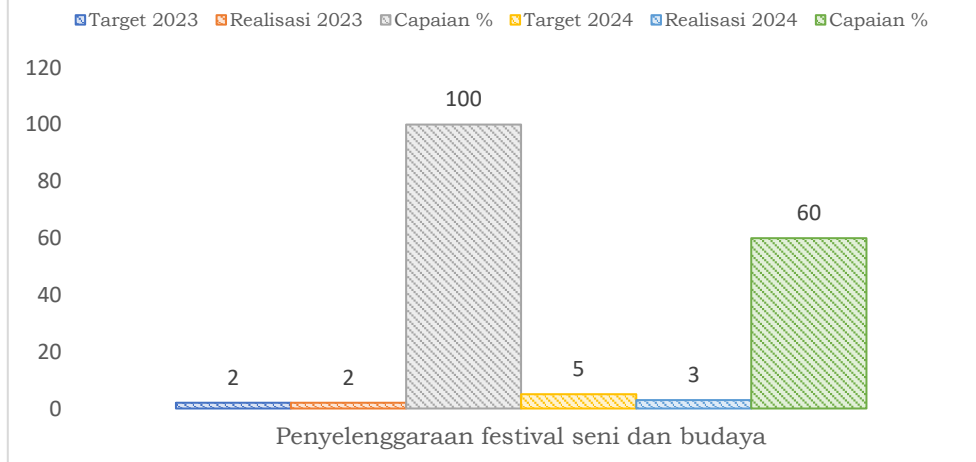
1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Penyelenggaraan festival seni dan budaya pada tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	2	100	5	3	60
Rata – rata capaian				100			60

GRAFIK 3.3
FESTIVAL KESENIAAN DAN KEBUDAYAAN
YANG DISELENGGARAKAN PADA TAHUN
2024



Festival Seni dan budaya yang diselenggarakan pada Tahun 2024 sebanyak 3 event, yaitu :

- 1) Pekan Kebudayaan Daerah Sumatera Barat di Padang pada bulan Oktober, kegiatan ini diadakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Pada acara ditampilkan Tari dan Musik Kreasi dari Sanggar Seni Puti Bungsu Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh.
- 2) Festival Bundo Kandung di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilaksanakan pada bulan Juni yang diikuti oleh Bundo Kandung, Rang Mudo dan Puti Bungsu utusan Kecamatan se Kabupaten Lima Puluh Kota
- 3) Pekan Budaya Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan pada bulan Juli, yang melibatkan seluruh unsur pelaku Seni dan Budaya di Kabupaten Lima Puluh Kota, antara lain :
 - a. Sanggar/Kelompok/Grup/Komunitas Seni dan Budaya
 - b. Niniak Mamak/Bundo Kandung/Rang Mudo dan Puti Bungsu se Kabupaten Lima Puluh Kota
 - c. Siswa/siswi tingkat SD/SLTP dan SLTA se Kabupaten Lima Puluh Kota
 - d. OPD se Kabupaten Lima Puluh Kota

2. Pelaksanaan Event dan promosi seni dan budaya

Event dan promosi seni dan budaya yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Pelaksanaan Event dan promosi seni dan budaya pada tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %
1.	Jumlah event dan promosi seni dan budaya yang dilaksanakan	2	2	100	15	15	100
Rata – rata capaian				100			100



Event dan promosi seni dan budaya yang diselenggarakan pada Tahun 2024 sebanyak 15 event, yaitu :

- 1) Kesenian Tradisi Sampelong Nagari Talang Maua Kecamatan Mungka dan Anyaman Mansiang Taratak Nagari Kubang Kecamatan guguk ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia Tahun 2023.

- 2) Dilakukan Pekan Budaya, dimana ada 9 cabang festival dan lomba.
- 3) Terealisasinya pemberian bantuan hibah barang berupa pengadaan Baju Qasidah Rebana untuk Kecamatan Harau dan Kecamatan Payakumbuh (5 Grup Qasidah Rebana).
- 4) Terlaksananya pelatihan adat untuk Niniak Mamak dan Bundo Kanduang Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Mungka, Kecamatan Akabiluru dan Kecamatan Guguak (538 orang).
- 5) Terealisasinya pemberian bantuan hibah barang berupa bantuan Pakaian Tradisional untuk Niniak Mamak dan Bundo Kanduang (20 Lembaga Adat).
- 6) Juara 1 penilaian nagari berbasis Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah yang diperoleh oleh Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak.
- 7) Terlaksananya Pendokumentasian Seni Tradisi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 (3 objek).
- 8) Terlaksananya penampilan Seni dalam Kabupaten Lima Puluh Kota (16 kali).
- 9) Terlaksananya penampilan seni tingkat Provinsi (Kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah, 1 kali).
- 10) Terlaksananya penampilan seni Luar Provinsi di TMII (1 kali).
- 11) Terlaksananya penampilan seni Luar Negeri (Malaysia, 1 kali).
- 12) Terlaksananya Lomba Cabang Seni Tari Minang Kreasi untuk sekolah Tingkat SD dan Vokal Grup untuk sekolah Tingkat SLTP se Kabupaten Lima Puluh Kota (30 sekolah).
- 13) Terlaksananya pelatihan Tari untuk Sanggar Tari dan Randai untuk Grup Randai se Kabupaten Lima Puluh Kota (93 orang).
- 14) Terealisasinya bantuan hibah barang berupa alat musik dan kostum untuk Sanggar/Grup/Kelompok seni di Kabupaten Lima Puluh Kota (12 Sanggar/Kelompok/Grup).

- 15) Terlaksananya pelatihan Musik Tradisi untuk Siswa tingkat SLTP dan pelatihan Qasidah Rebana untuk Grup Qasidah Rebana se Kabupaten Lima Puluh Kota (103 orang).

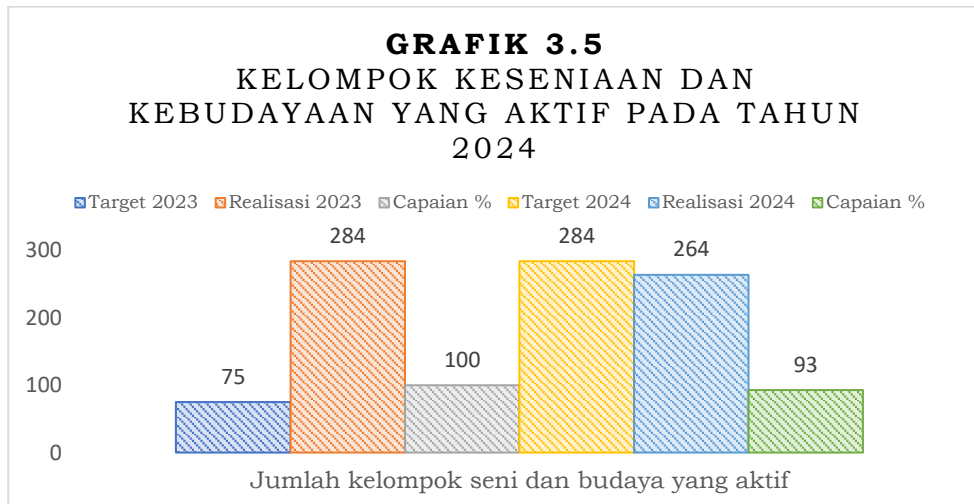
2. Meningkatkan Pendataan terhadap Kelompok Seni dan Budaya

Jumlah kelompok kesenian dan kebudayaan yang aktif pada Tahun 2024 yaitu 264 kelompok kesenian, yang diambil dari data jumlah peserta yang ikut pada kegiatan Pekan Budaya, Festival Bundo Kandung serta dari jumlah Sanggar/Kelompok dan Grup Seni yang mendapatkan bantuan belanja hibah barang tahun 2024.

Keberhasilan indikator kinerja disebabkan sudah banyaknya kelompok masyarakat yang diberikan pelatihan dan bantuan melalui bantuan hibah barang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Solusi yang telah dilakukan dalam menunjang keberhasilan yaitu mempromosikan sanggar seni dan budaya jika ada penampilan tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Pendataan kelompok kesenian dan kebudayaan yang aktif ini dilakukan dengan pencacahan terhadap seluruh kelompok kesenian dan kebudayaan yang ada pada masing-masing kecamatan.

Tabel 3.6
Kelompok seni dan budaya yang aktif pada tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %
1.	Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif	75	284	100	284	264	93
Rata – rata capaian				100			93



3. Meningkatkan pengelolaan terhadap cagar budaya

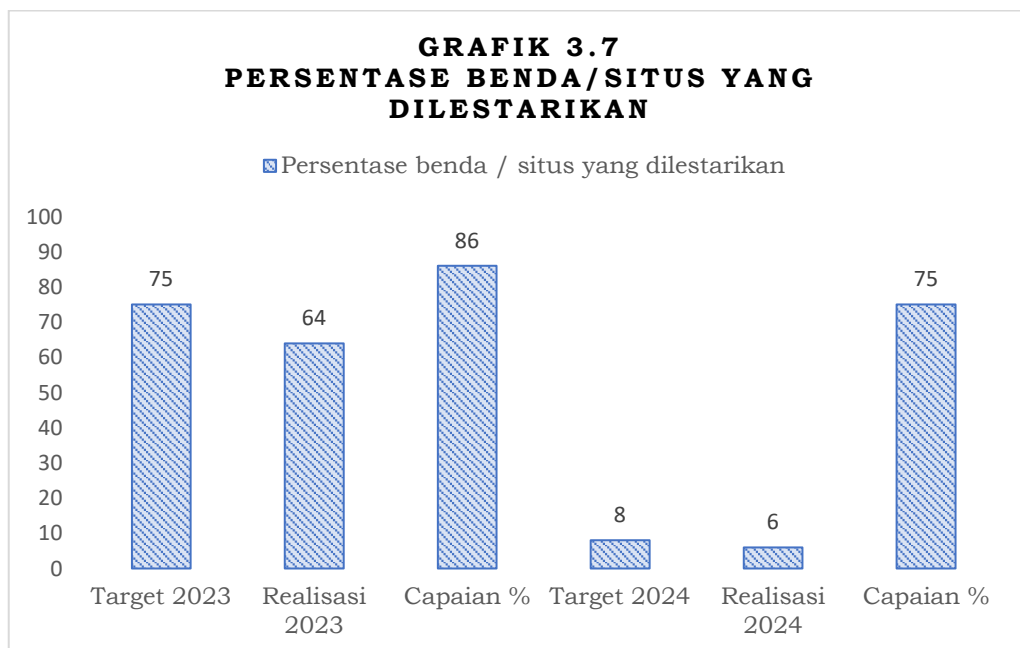
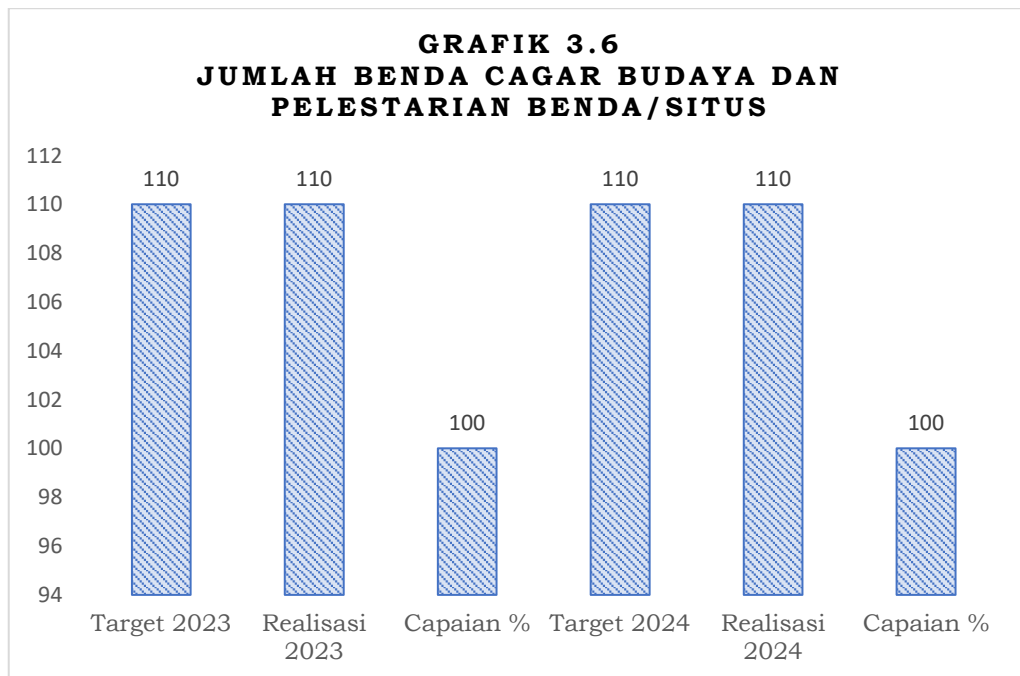
Untuk Meningkatkan Pengelolaan terhadap Cagar Budaya, Pada tahun 2024 dilakukan beberapa kegiatan, yaitu :

- 1) Dilaksanakannya Kemah Budaya dengan melibatkan siswa/siswi SLTP se Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 120 orang, yang dilaksanakan di Kawasan Objek Cagar Budaya Talempong Batu Nagari Talang Anau Kecamatan gunuang Omeh.
- 2) Dilaksanakannya Sidang Penetapan Objek Diduga Cagar budaya menjadi Cagar Budaya tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 6 Cagar Budaya, antara lain (1)Rumah Perundingan PDRI Padang Jopang Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak, (2) Rumah Tan Malaka Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh, (3) Menhir Bawah Parit Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan, (4) Menhir Balai Batu Koto Gadang Nagari Maek Kecamatan bukit Barisan, (5) Kantor PDRI Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh dan (6) Mesjid Tuo Ampang Godang Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak
- 3) Terlaksananya Sosialisasi Perlindungan Cagar Budaya dengan peserta camat, Penjaga Situs, Wali Nagari, KAN, Pokdarwis Nagari dan Tim Ahli Cagar Budaya (60 orang).

Pada tahun 2024 pendataan terhadap Jumlah benda cagar budaya dan pelestarian benda/situs tidak dilaksanakan, sehingga data yang ada masih sama data tahun 2023. Pada tahun 2024 telah ditetapkan Objek Diduga Cagar Budaya Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi Cagar Budaya tingkat Kabupaten, sebanyak 6 Cagar Budaya. Persentase benda / situs yang dilestarikan pada Tahun 2024 yaitu 64 % dari 150 buah situs cagar yang diperkirakan tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, masih sama dengan kondisi data tahun 2023.

Tabel 3.7
Jumlah benda cagar budaya dan pelestarian benda/situs

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %
1.	Jumlah benda cagar budaya yang terdata	110	110	100	110	100	100
2.	Persentase benda / situs yang dilestarikan	75	64	86	8	6	75
		Rata - rata capaian		93			87,5



Jumlah benda cagar budaya yang terdata pada Tahun 2024 tidak ada. Keberhasilan indikator kinerja ini dipengaruhi oleh program pelestarian Benda Cagar Budaya/Situs, hal ini dipengaruhi dengan telah dilaksanakannya pendataan terhadap benda cagar budaya dan situs yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bidang Kebudayaan.

Tabel 3.8
Data Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Nama Cagar Budaya	Alamat
1.	Menhir Ronah I	Jr. Ronah Nag. Maek Kec. Bukik Barisan
2.	Menhir Ronah II	Jr. Ronah Nag. Maek Kec. Bukik Barisan
3.	Menhir Ronah III	Jr. Ronah Nag. Maek Kec. Bukik Barisan
4.	Menhir Padang Ilalang (Bukit Domo I)	Jr. Ronah Nag. Maek Kec. Bukik Barisan
5.	Menhir Bukit Domo II	Jr. Ronah Nag. Maek Kec. Bukik Barisan
6.	Menhir Bukit Domo III	Jr. Ronah Nag. Maek Kec. Bukik Barisan
7.	Menhir Kayu Kaciak	Jorong Maek, Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan
8.	Menhir Kampung I	Jorong Koto Gadang Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan
9.	Menhir Kampung II	Jorong Koto Gadang Nagari Maek Kec. Bukik Barisan
10.	Megalit Ampang Gadang I	Jorong Ampang Gadang, Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan
11.	Bakal Menhir Ampang Gadang	Jorong Ampang Gadang, Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan
12.	Menhir Balai Batu (Koto Gadang)	Jorong Koto Gadang, Nagari Mahat Kec. Bukik Barisan
13.	Menhir Bawah Parit	Jorong Koto Tinggi, Nagari Mahat Kec. Bukik Barisan
14.	Rumah PDRI Koto Tinggi	Jorong Kampuang Melayu, Nagari Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh
15.	Tugu PDRI Koto Tinggi	Jorong Kampuang Melayu, Nagari Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh
16.	Menhir Koto Tinggi	Jorong Kampuang Melayu, Nagari Koto Tinggi, Kec. Gunuang Omeh
17.	Batu Talempong	Jorong Talang Anau, Nagari Talang Anau, Kec. Gunuang Omeh
18.	Menhir Guguak Nunang	Jorong Guguak Nunang, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
19.	Menhir Balubus	Jorong Belubus, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak

No	Nama Cagar Budaya	Alamat
20.	Menhir Sungai Talang I	Jorong Sungai Talang, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
21.	Megalit Sungai Talang II	Jorong Sungai Talang, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
22.	Megalit Sungai Talang III	Jorong Sungai Talang, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
23.	Megalit Lumpang Batu Sungai Talang	Jorong Sungai Talang, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
24.	Megalit Siti (Bukit Parasi)	Jorong Belubus, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
25.	Menhir Subarang	Jorong Subarang, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
26.	Lumpang Batu Belubus	Jorong Belubus, Nagari Sungai Talang, kec. Guguak
27.	Megalit Bukit Tinjauan	Jorong Belubus, Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguak
28.	Menhir Tanah Sirah	Jorong Sungai Talang, Nagari Sungai Talang Kec. Guguak
29.	Menhir Tiakar	Jorong Tiakar Nagari VIII Koto Kec. Guguak
30.	Menhir Kuranji	Jorong Kuranji Nagari Guguak VIII, Kec. Guguak
31.	Megalit Balai Talang	Jorong Balai Talang, Nagari Guguak VII Koto Kec. Guguak
32.	Menhir Balai Adat Guguak	Jorong Guguak, Nagari Guguak VIII Koto Kec. Guguak
33.	Megalit Pincuran Betung	Jorong Pincuran Betung, Nagari VIII Koto Kecamatan Guguak
34.	Rumah dan Tugu PDRI Padang Jepang	Jorong Padang Jopang Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
35.	Megalit Padang Jepang	Jorong Ampang Gadang, Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
36.	Menhir Simpang Bakir I	Jorong Talago, Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
37.	Menhir Simpang Bakir II	Jorong Talago, Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
38.	Menhir Talago	Jorong Balai Talang, Nagari Guguak VII Koto Talago Kec. Guguak

No	Nama Cagar Budaya	Alamat
39.	Menhir Tanjung.Jati I	Jorong Tanjung Jati, Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
40.	Menhir Tanjung.Jati II	Jorong Tanjung Jati II, Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
41.	Megalit Koto Kociak	Jorong Koto Kaciak Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
42.	Menhir Kubang I	Jorong Ampang Gadang, Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
43.	Menhir Kubang II	Jorong Ampang Gadang, Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak
44.	Menhir Limbanang I	Jorong Manang Baruah, Nagari Limbanang Kec. Suliki
45.	Megalit Limbanang II	Jorong Limbanang Bawah, Nagari Limbanang Kec. Suliki
46.	Megalit Limbanang III	Limbanang Kec. Suliki
47.	Menhir Anding	Jorong Padang Bungo, Nagari Anding Kec. Suliki
48.	Lesung Batu Anding	Jorong Andiang Mudiak, Nagari Anding Kec. Suliki
49.	Kawasan Gua Prasejarah	Nagari Andaleh, Kecamatan Luak
50.	Situs Gua Prasejarah Balik Bukit	Jorong Baliak Bukit, Nagari Andaleh, Kecamatan Luak
51.	Kubang Tinggi I	Jorong Gurun, Nagari Gurun Kecamatan Harau
52.	Kubang Tinggi II	Jorong Gurun, Nagari Gurun Kecamatan Harau
53.	Makam Keturunan Raja Kamboja	Jorong Maek, Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan
54.	Batu Basurek Tanjung Bungo/Buaya	Koto Lamo Kec. Kapur IX
55.	Medan Nan Bapaneh Koto Rajo	Jorong Ateh Nagari, Nagari Situjuah Ladang Laweh Kec. Situjuah Limo Nagari
56.	Rumah Gadang Dt.Perpatiah	Jorong Ateh Nagari, Nagari Situjuah Ladang Laweh Kec. Situjuah Limo Nagari
57.	Rumah Gadang Ukiran Cino	Jorong Batu Nan Limo, Nagari Simalanggang, Kec. Payakumbuh
58.	Mesjid Ampang Gadang	Jorong Ampang Gadang VII Koto Talago Kec. Guguak

No	Nama Cagar Budaya	Alamat
59.	Makam Syeikh Batu Hampar	Jorong Batu Hampar, Nagari Batu Hampar Kec. Akabiluru
60.	Menara Pesantren Al-Manar	Jorong Batu Hampar, Nagari Batu Hampar Kec. Akabiluru
61.	Menhir Lareh Kuniang	Jorong Lubuak Batingkok Nagari Lubuak Batingkok Kec. Harau
62.	Kawasan Pemukiman Tradisional Rumah Gadang Gunuang Omeh	Jorong Lakuang, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh
63.	Stasiun Piladang	Jorong Piladang, Nagari Koto Tengah Batu Hampar Kec. Akabiluru
64.	Stasiun Simalanggang	Koto Tengah, Nagari Simalanggang, Kec. Payakumbuh
65.	Stasiun Danguang-danguang	Jorong Danguang-Danguang, Nagari VIII Koto Kec. Guguak
66.	Stasiun Limbanang	Jorong Limbanang, Nagari Limbanang Kec. Suliki
67.	Megalit Tanjung Beringin	Tanjung Beringin Kec. Harau
68.	Megalit Koto Kecil I	Koto Kaciak Kec. Guguak
69.	Megalit Koto Kecil II	Koto Kaciak Kec. Guguak
70.	Lasuang Batu Kubang Tinggi	Jr. Gurun, Nag. Gurun, Kec. Harau
71.	Menhir Batu Mejan	Jr. Koto Tengah Nagari Koto Tengah Kec. Bukik Barisan
72.	Menhir Tobiang Tinggi	Jr. Tobiang Tinggi Nag. Koto Tengah Kec. Bukik Barisan
73.	Batu Manggigia	Jr. Mungka, Nag. Mungka, Kec. Mungka
74.	Balai Adat Gontiang Nan Indak Putuih	Jr. Mungka, Nag. Mungka, Kec. Mungka
75.	Menhir Tanah Longiah	Jr. Tanah Longiah, Nag. Sungai Rimbang, Kec. Suliki
76.	Lasuang Batu Kuciang	Jr. Dalam Koto, Nag. Taeh Baruah Kec. Payakumbuh
77.	Batu Nobat Taeh Baruah	Jr. Dalam Koto, Nag. Taeh Baruah Kec. Payakumbuh
78.	Batu Nan Limo	Jr. Batu Nan Limo, Nag. Koto Tengah Simalanggang, Kec. Payakumbuh

No	Nama Cagar Budaya	Alamat
79.	Lasuang Baukia	Jr. Dalam Koto, Nag. Taeh Baruah Kec. Payakumbuh
80.	Batu Bajari	Jr. Ambacang, Nag. Pauah Sangik Kec. Akabiluru
81.	Rumah Gadang Gonjong Anam Angku Domang	Jr. Aia Randah Nag. Balai Panjang Kec. Lareh Sago Halaban
82.	Batu Sandaran Balai Gobah	Jr. Simpang Empat Balai Jariang, Nagari Labuah Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban
83.	Tabuah Gadang	Jr. Simpang Empat Balai Jariang, Nagari Labuah Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban
84.	Rumah Markas AURI / Pemancar Radio PDRI	Jorong Pua Data, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh
85.	Rumah Singgah Amir (Wakil Kepala Studio AURI PDRI)	Jorong Sei Dadok, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh
86.	Rumah Tinggal Yasin dan Keluarga Saat PDRI	Jorong Sei Siriah, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh
87.	Rumah Tan Malaka	Jorong Kampung Patai, Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh
88.	Tempat Nasi Peninggalan Bapak Yasin (Pejuang PDRI)	Jorong Sei Siriah, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh
89.	Tutup Wadah Nasi Peninggalan Bapak Yasin (Pejuang PDRI)	Jorong Sei Siriah, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh
90.	Mesjid Godang Lamo	Jorong Sialang Atas, Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX
91.	Makam Syeikh Sulaiman Zuhdi	Jorong Balai Tengah, Nagari Lubuak Alai, Kecamatan Kapur IX
92.	Lokasi Gua Lidah Ajer	Kawasan Perbukitan Kojai Nagari Situjuah Tungka, Kecamatan Situjuah Limo Nagari
93.	Menhir Batu Giriang-Giriang	Nagari Sariak Loweh Kecamatan Akabiluru
94.	Romah Godang Ukiran Cino	Jorong Koto Tanggah Simalanggang Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh
95.	Megalid Pangkalan	Jorong Pasa Baru Nagari Pangkalan Kecamatan Koto Baru
96.	Menara Mesjid Kubang	Jorong Kubang Nagari Kubang Kec. Guguak

No	Nama Cagar Budaya	Alamat
97.	Makam Haji Piobang	Jorong Gando, Nagari Piobang, Kecamatan Payakumbuh
98.	Surau Tuo Taram	Jorong Cubadak Nagari Taram Kecamatan Harau
99.	Megalit Tanjung Mesjid	Koto Gadang Mahat Kec. Bukik Barisan
100.	Megalit Tanjung Beringin	Kubang Tinggi Kec. Harau
101.	Menhir Batu Nan Limo	Jorong Koto Tangah Simalanggang Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh
102.	Tugu PDRI Halaban	Halaban Kec, Lareh Sago Halaban
103.	Batu Basurek Koto Lamo	Jorong Tanjung Bungo, Nagari Koto Lamo Kec. Kapur IX
104.	Menhir Balai Koto Tangah I	Jorong Koto Tangah Nagari Koto Tangah Kec. Bukik Barisan
105.	Menhir Balai Koto Tangah II	Jorong Koto Tangah Nagari Koto Tangah Kec. Bukik Barisan
106.	Menhir Balai Koto Tangah III	Jorong Koto Tangah Nagari Koto Tangah Kec. Bukik Barisan
107.	Batu Sandaran Niniak	Jorong Kampuang Dalam Nagari Limbangan Kec. Suliki
108.	Tombak Syekh Tuo Taram	Jorong Cubadak, Nagari Taram Kec. Harau
109.	Megalit Ekor Parit	Jorong Ekor Parit Nagari Limbang Kecamatan Suliki
110.	Mesjid Usuludin Batu Bulan	Jorong Batu Bulan, Nagari Sungai Antuan Kec. Mungka

Dalam rangka mencapai pelaksanaan indikator kinerja tujuan Persentase Pemberlakuan norma adat yang berlaku dan Meningkatkan Kualitas Keseniaan dan Kebudayaan Daerah, terdapat 4 program dengan 7 kegiatan dan 10 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Program dan Kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Realisasi Program dan Kegiatan Pelaksanaan Indikator Kinerja Tujuan
Optimalnya Pendidikan dan Fungsi Kelembagaan Agama, Adat dan Budaya

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realissi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	%
	URUSAN BIDANG KEBUDAYAAN	2,767,358,600.00	2,420,012,958.00	347,345,642.00	87.45
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1,958,758,600.00	1,714,679,594.00	244,079,006.00	92.16
02.2.01.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	177,941,800.00	163,987,604.00	13,954,196.00	92.16
02.2.01.0001.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	77,941,800.00	63,987,604.00	13,954,196.00	82.10
02.2.01.0002.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100.00
02.2.02.	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	859,316,800.00	643,663,390.00	215,653,410.00	74.90
02.2.02.0001.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	544,096,100.00	540,147,000.00	3,949,100.00	99.27
02.2.02.0002.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	315,220,700.00	103,516,390.00	211,704,310.00	32.84
02.2.03.	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	921,500,000.00	907,028,600.00	14,471,400.00	99.40
02.2.03.0002.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	220,000,000.00	218,679,600.00	1,320,400.00	99.40
02.2.03.0003.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	701,500,000.00	688,349,000.00	13,151,000.00	98.13

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realissi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	%
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	475,000,000.00	472,718,158.00	2,281,842.00	99.52
03.2.01.	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	475,000,000.00	472,718,158.00	2,281,842.00	99.52
03.2.01.0003.	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	475,000,000.00	472,718,158.00	2,281,842.00	99.52
5.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN Cagar Budaya	240,600,200.00	232,615,206.00	7,984,994.00	94.41
05.2.01.	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	117,223,900.00	110,673,906.00	6,549,994.00	94.41
05.2.01.0002.	Penetapan Cagar Budaya	117,223,900.00	110,673,906.00	6,549,994.00	94.41
05.2.02.	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	123,376,300.00	121,941,300.00	1,435,000.00	98.84
05.2.02.0003.	Pemanfaatan Cagar Budaya	123,376,300.00	121,941,300.00	1,435,000.00	98.84
6.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	92,999,800.00	0.00	92,999,800.00	0.00
06.2.01.	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	92,999,800.00	0.00	92,999,800.00	0.00
06.2.01.0002.	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	92,999,800.00	0.00	92,999,800.00	0.00
	JUMLAH TOTAL	2,767,358,600.00	2,420,012,958.00	347,345,642.00	87.45

Sasaran Strategi 2

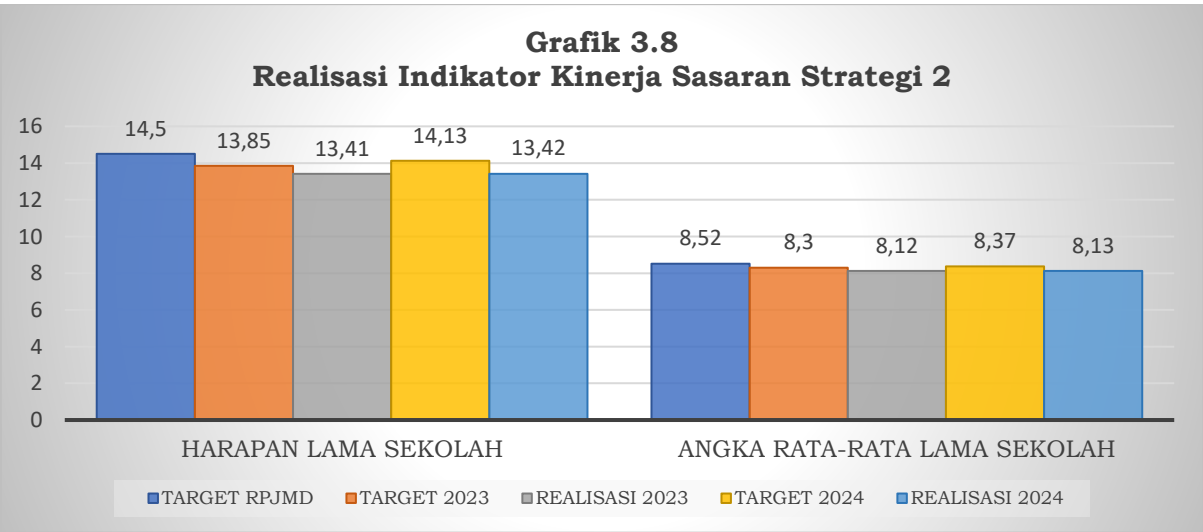
Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan

Sasaran strategis 2 yaitu Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan dengan indikator kinerja adalah :

- 1) Angka Harapan Lama Sekolah.
- 2) Angka rata-rata Lama sekolah

Tabel 3.10
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategi 2

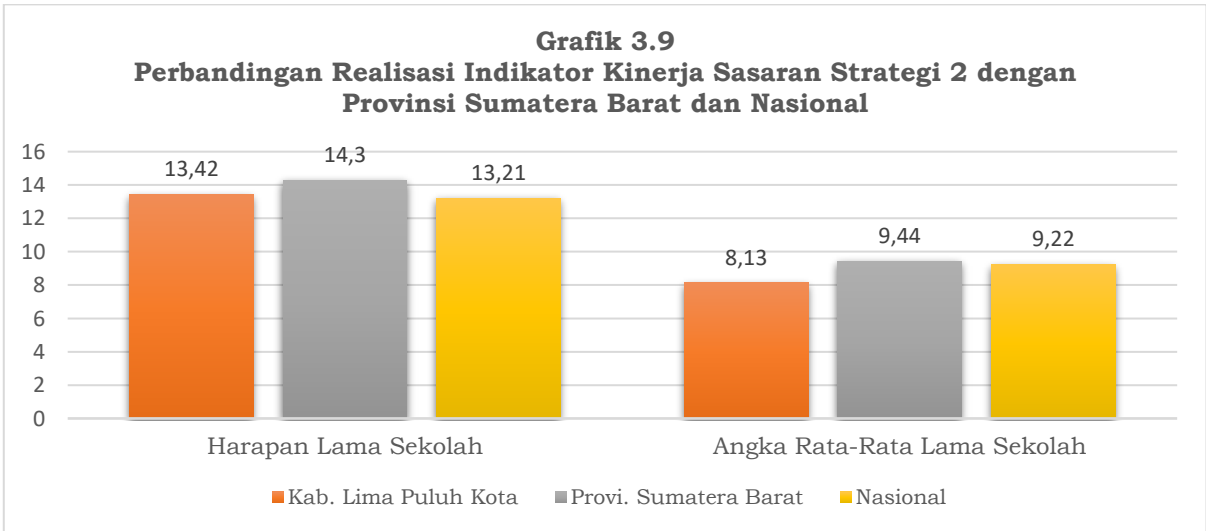
INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	KET.
Harapan Lama Sekolah	14,5 tahun	13,85 tahun	13,41 tahun	14,13 tahun	13,42 tahun	
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,52 tahun	8,30 tahun	8,12 tahun	8,37 tahun	8,13 tahun	



Jika dibandingkan capaian angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah dengan capaian propinsi dan nasional, perbandingannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategi 2 dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Capaian			Ket.
		Kab. Lima Puluh Kota	Propinsi Sumatera Barat	Indonesia	
1.	Harapan Lama Sekolah	13,42 tahun	14,30 tahun	13,21 tahun	
2.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,13 tahun	9,44 tahun	9,22 tahun	



1. Angka Harapan Lama Sekolah.

Angka harapan lama sekolah merupakan lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah ini merupakan indikator makro yang penghitungannya menjadi tanggung jawab

Badan Pusat Statistik (BPS) dan dipublikasikan pada Lima Puluh Kota Dalam Angka tahun berikutnya.
Tahun 2024 Angka Harapan Lama Sekolah yaitu 13,42.

Pada sasaran ini pencapaian indikator kinerja adalah 94,98%, dengan prediket Sangat Tinggi. Namun walaupun prediketnya sangat tinggi, tetapi Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2024 ini belum memenuhi target tahun 2024 yang sudah ditetapkan yaitu : 14,13 tahun. Dengan target 14,13 tahun ini diharapkan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan mengenyam pendidikan sampai Diploma - 2 (D-2).

Ditinjau pada capaian tahun sebelumnya Capaian angka harapan lama sekolah pada tahun 2024 meningkat 0,01 dibanding capaian tahun 2023, tetapi jika dilihat pada pencapaian target terhadap angka harapan lama sekolah belum terpenuhi sebesar 0,71.

Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya penjangkaran terhadap anak tidak sekolah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Solusi atau upaya yang dilakukan dalam meningkatkan angka harapan lama sekolah adalah Intervensi terhadap Program Pengelolaan Pendidikan pada tahun 2024. Indikator yang mempengaruhi angka harapan lama sekolah adalah :

- 1) Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan,
- 2) Memberikan Dana BOS,
- 3) Kegiatan Penyelenggaraan Program Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)
- 4) Kegiatan peningkatan akreditasi sekolah,
- 5) Sosialisasi kepada orang tua agar mengajak anaknya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka menekan angka putus sekolah.

2. Angka Rata-rata Lama Sekolah.

Angka Rata-rata Lama Sekolah merupakan cerminan angka bertahan sekolah pada implementasi layanan pendidikan pada masyarakat.

Tahun 2024 Angka Rata-rata Lama Sekolah yaitu 8,13 tahun.

Pada sasaran ini pencapaian indikator kinerja adalah 97,13%, dengan prediket Sangat Tinggi. Angka Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2024 ini belum mencapai target tahun 2024 yang sudah ditetapkan yaitu : 8,37 tahun.

Ditinjau pada capaian tahun sebelumnya Capaian angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2024 hanya meningkat 0,01 dibanding capaian tahun 2023, dan jika dilihat pada pencapaian target terhadap angka rata-rata lama sekolah belum mencapai target 2024 yaitu 8,37 tahun, masih dibawah target sebesar 0,24.

Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya penjangkaran terhadap anak tidak sekolah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah adalah layanan pendidikan non formal. Kegagalan atau keberhasilan terhadap angka rata-rata lama sekolah sama halnya dengan angka harapan lama sekolah, yakni dengan adanya dukungan program dan kegiatan pada pendidikan formal maupun non formal. Dimana akses pendidikan untuk meningkatkan tingkat pendidikan akhir penduduk per usia 15 tahun keatas tersedia pada kegiatan belajar di Paket A, B dan C.

Selain itu pemberian Beasiswa melalui Program Indonesia Pintar dan Bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa baru yang bersumber pada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Peningkatan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah, dilakukan dengan upaya meningkatkan angka partisipasi

pendidikan dasar (APS SD/MI/PAKET A dan APS SMP/MTS/PAKET B), menekan angka putus sekolah, dan meningkatkan angka melanjutkan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menunjang terhadap peningkatan angka harapan lama sekolah dan Angka Rata-rata Lama sekolah.

Pada tahun 2024, Capaian Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota terkait hal di atas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pendidikan

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2024		Ket.
			Target	Realisasi	
1	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8.37	8.13	
2	Angka harapan lama sekolah	Tahun	14.13	13.42	
3	Jumlah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Lembaga	301	319	
4	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD	%	52.69	39.54	
5	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	110.68	97.48	
6	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	90.8	95.49	
7	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99.8	88.23	
8	Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	85.97	84.94	

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2024		Ket.
			Target	Realisasi	
9	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	99.48	90.08	
10	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	97.67	87.23	
11	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0.001	0.04	
12	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0.01	0.05	
13	Angka kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	
14	Angka kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	
15	Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100	
16	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Ruang	1756	1751	
17	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Ruang	482	477	
18	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	89	79	
19	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	25.9		
20	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	10.86	8.73	
21	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	%	8.8		
22	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	%	0.48	0.57	
23	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata pendidikan menengah	%	1.81		

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2024		Ket.
			Target	Realisasi	
24	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	44.75	61.5	
25	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	89.91	88.52	
26	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	46.32	79.5	
27	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	2.9	6.43	
28	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	5	3	
29	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Situs	110	110	
30	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Buah	70	70	
31	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Buah	20	20	
32	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	85	85	

Pada indikator sasaran ini yaitu Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah, terdapat 2 program dengan 5 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Program dan Kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Realisasi Program/kegiatan yang mendukung Angka Harapan Lama Sekolah
dan Angka Rata-rata Lama Sekolah

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	%
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	112,591,970,040.00	110,583,732,539.00	2,008,237,501.00	98,22
02.2.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	71,189,014,843.00	70,320,986,348.00	868,028,495.00	98.78
02.2.01.0003.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1,319,628,000.00	1,303,237,000.00	16,391,000.00	98.76
02.2.01.0005.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1,100,560,000.00	1,084,149,000.00	16,411,000.00	98.51
02.2.01.0006.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2,814,580,000.00	2,799,821,000.00	14,759,000.00	99.48
02.2.01.0009.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	549,249,000.00	547,146,000.00	2,103,000.00	99.62
02.2.01.0011.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	957,420,000.00	954,046,000.00	3,374,000.00	99.65
02.2.01.0014.	Pengadaan Mebel Sekolah	1,955,668,568.00	1,933,263,500.00	22,405,068.00	98.85
02.2.01.0022.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	5,060,000,000.00	4,934,637,000.00	125,363,000.00	97.52
02.2.01.0025.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	287,821,000.00	247,514,295.00	40,306,705.00	86.00
02.2.01.0026.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	154,364,200.00	135,764,681.00	18,599,519.00	87.95
02.2.01.0027.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada	616,964,800.00	569,513,657.00	47,451,143.00	92.31

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	%
	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				
02.2.01.0029.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	37,958,781,200.00	37,737,053,215.00	221,727,985.00	99.42
02.2.01.0031.	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	4,673,436,000.00	4,575,486,000.00	97,950,000.00	97.90
02.2.01.0038.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	779,120,000.00	717,227,000.00	61,893,000.00	92.06
02.2.01.0047.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	359,200,000.00	356,540,000.00	2,660,000.00	99.26
02.2.01.0048.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,482,164,075.00	1,474,805,000.00	7,359,075.00	99.50
02.2.01.0050.	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	10,080,000.00	5,250,000.00	4,830,000.00	52.08
02.2.01.0051.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	11,109,978,000.00	10,945,533,000.00	164,445,000.00	98.52
02.2.02.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	27,023,476,100.00	26,611,936,144.00	411,539,956.00	98.48
02.2.02.0004.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	518,900,000.00	517,164,200.00	1,735,800.00	99.67
02.2.02.0006.	Pembangunan Laboratorium	1,906,630,000.00	1,873,365,800.00	33,264,200.00	98.26
02.2.02.0012.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	432,200,000.00	429,543,000.00	2,657,000.00	99.39
02.2.02.0014.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2,677,580,000.00	2,543,175,405.00	134,404,595.00	94.98

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	%
02.2.02.0017.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	748,506,700.00	733,084,000.00	15,422,700.00	97.94
02.2.02.0018.	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	848,728,000.00	837,004,000.00	11,724,000.00	98.62
02.2.02.0024.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	301,260,000.00	299,355,000.00	1,905,000.00	99.37
02.2.02.0035.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	356,925,000.00	355,595,000.00	1,330,000.00	99.63
02.2.02.0038.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	298,156,000.00	246,776,210.00	51,379,790.00	82.77
02.2.02.0039.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	11,444,000.00	10,440,008.00	1,003,992.00	91.23
02.2.02.0040.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	455,680,000.00	402,177,299.00	53,502,701.00	88.26
02.2.02.0042.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	16,773,040,000.00	16,744,387,122.00	28,652,878.00	99.83
02.2.02.0051.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	316,777,100.00	269,699,100.00	47,078,000.00	85.14
02.2.02.0058.	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	9,975,000.00	8,400,000.00	1,575,000.00	84.21
02.2.02.0059.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	903,844,000.00	885,705,000.00	18,139,000.00	97.99
02.2.02.0064.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang	463,830,300.00	456,065,000.00	7,765,300.00	98.33

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	%
	Guru/Kepala Sekolah/TU				
02.2.03.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7,550,873,097.00	7,358,968,347.00	191,904,750.00	97.46
02.2.03.0002.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	967,104,497.00	962,836,309.00	4,268,188.00	99.56
02.2.03.0003.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	195,000,000.00	194,321,000.00	679,000.00	99.65
02.2.03.0007.	Pengadaan Mebel PAUD	75,000,000.00	74,814,000.00	186,000.00	99.75
02.2.03.0009.	Pengadaan Perlengkapan PAUD	229,111,600.00	214,150,600.00	14,961,000.00	93.47
02.2.03.0012.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	498,000,000.00	472,510,000.00	25,490,000.00	94.88
02.2.03.0013.	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	672,494,000.00	550,259,000.00	122,235,000.00	81.82
02.2.03.0016.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	161,052,000.00	154,055,223.00	6,996,777.00	95.66
02.2.03.0018.	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4,026,000,000.00	4,012,800,000.00	13,200,000.00	99.67
02.2.03.0019.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	31,500,000.00	30,300,000.00	1,200,000.00	96.19
02.2.03.0028.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	483,060,000.00	480,969,215.00	2,090,785.00	99.57
02.2.03.0030.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	147,550,000.00	147,127,000.00	423,000.00	99.71

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	%
02.2.03.0041.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	65,001,000.00	64,826,000.00	175,000.00	99.73
02.2.04.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6,828,606,000.00	6,291,841,700.00	536,764,300.00	92,14
02.2.04.0001.	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	736,832,000.00	736,135,000.00	697,000.00	99.91
02.2.04.0010.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00
02.2.04.0011.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	280,000,000.00	197,489,000.00	82,511,000.00	70.53
02.2.04.0015.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	55,210,000.00	46,180,000.00	9,030,000.00	83.64
02.2.04.0016.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	156,788,000.00	126,147,100.00	30,640,900.00	80.46
02.2.04.0017.	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5,101,700,000.00	4,907,176,000.00	194,524,000.00	96.19
02.2.04.0042.	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	172,500,000.00	168,361,600.00	4,138,400.00	97.60
02.2.04.0047.	Pembangunan Ruang Laboratorium	45,576,000.00	30,800,000.00	14,776,000.00	67.58
02.2.04.0050.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	80,000,000.00	79,553,000.00	447,000.00	99.44

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	%
4.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	33,836,000.00	11,600,000.00	22,236,000.00	34.28
04.2.01.	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	33,836,000.00	11,600,000.00	22,236,000.00	34.28
04.2.01.0001.	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	33,836,000.00	11,600,000.00	22,236,000.00	34.28

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran 2 tersebut di atas adalah sebesar Rp. **110,595,332,539.00** dari anggaran sebesar Rp. **112,625,806,040.00** atau **98,22%**. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran dengan Indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah 97,13% dan Angka Harapan Lama Sekolah 94,98% maka tidak terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

<p>Sasaran Strategi 3</p> <p><i>Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah</i></p>
--

Sasaran strategis 3 yaitu Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator kinerja adalah Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB). Adapun capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 3

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	% Realisasi	% Capaian	Predikat
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	1.	Nilai AKIP	69,68 (B)	75,08 (BB)	107,75	Sangat Tinggi
		2.	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	64,17 (CC)	70,81 (BB)	110,35	Sangat Tinggi
		3.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,97	92,78	100,88	Sangat Tinggi

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 3 di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Indikator kinerja : nilai indeks RB pada Tahun 2024 tidak lagi dinilai untuk masing-masing OPD tetapi yang dinilai sekarang adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dan Nilai Indeks RB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 yaitu 70,81 (BB).
- Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah disusun pada tahun 2021 dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2021 - 2026.

Penyusunan renstra ini dilakukan melalui pembahasan intensif mengenai arah organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan melibatkan seluruh pimpinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota. Sejalan dengan itu dilakukan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Penyusunan IKU juga dilakukan dengan berpedoman pada Perda RPJMD Tahun 2021 - 2026. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka menjamin penerapan nilai AKIP yang semakin baik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Tahun 2024 memperoleh “Kategori BB”.

Tabel 3.15
Rincian hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pendidikan Tahun 2024

No	Komponen yang dinilai	Nilai
A	Perencanaan Kinerja	25,52
B	Pengukuran Kinerja	20,05
C	Pelaporan Kinerja	13,63
D	Evaluasi Internal	15,88
E	Nilai Hasil Evaluasi Internal	75,08

Sumber: Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif.

Nilai IKM ini diukur untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan publik, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik,

seberapa jauh pelayanan publik memenuhi harapan masyarakat , tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan publik, tingkat keterlibatan masyarakat dalam memperoleh akses informasi publik.

Nilai IKM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini diukur dengan melakukan survei (Kuisisioner) kepuasan terhadap masyarakat dan stakeholder lainnya yang membutuhkan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Nilai IKM yang diperoleh ini berguna bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai acuan untuk selalu berbenah dalam peningkatan layanan kepada masyarakat, sebagai penataan sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan dan sebagai upaya untuk meningkatkan kreativitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat.

Pada tahun 2024 ini nilai IKM yang diperoleh adalah 92,78. Dimana capaiannya 100,88% yaitu sangat tinggi dibandingkan dengan target 91,97.

Tabel 3.16
Realisasi Program/kegiatan yang mendukung Pelaksanaan Indikator Kinerja Tujuan Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	%
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	455,455,476,429.00	450,776,074,450.00	4,679,401,979.00	98.97
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan	37,180,000.00	26,056,781.00	11,123,219.00	70.08

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,895,000.00	5,554,000.00	5,341,000.00	50.98
01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,602,000.00	1,580,000.00	22,000.00	98.63
01.2.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,602,000.00	1,580,000.00	22,000.00	98.63
01.2.01.0004.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,602,000.00	1,580,000.00	22,000.00	98.63
01.2.01.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1,602,000.00	1,580,000.00	22,000.00	98.63
01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,980,000.00	10,574,781.00	405,219.00	96.31
01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,897,000.00	3,608,000.00	5,289,000.00	40.55
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	455,137,421,949.00	450,497,421,934.00	4,629,129,863.00	98.98
01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	455,137,421,949.00	450,497,421,934.00	4,640,000,015.00	98.98
01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00
01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	47,073,480.00	46,723,480.00	350,000.00	99.26

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	%
01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,815,000.00	8,815,000.00	0.00	100.00
01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38,258,480.00	37,908,480.00	350,000.00	99.09
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127,800,000.00	116,293,055.00	11,506,945.00	91.00
01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	100.00
01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87,000,000.00	77,293,055.00	9,706,945.00	88.84
01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38,300,000.00	36,500,000.00	1,800,000.00	95.30
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105,446,000.00	89,579,200.00	15,866,800.00	84.95
01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39,190,000.00	23,649,400.00	15,540,600.00	60.35
01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50,805,000.00	50,749,800.00	55,200.00	99.89
01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,180,000.00	15,180,000.00	0.00	100.00
01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran 3 tersebut di atas adalah sebesar Rp. **450,776,074,450.00** dari anggaran sebesar Rp. **455,455,476,429.00** atau **98,97%**. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

D. Realisasi Anggaran

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota menyelenggarakan 2 urusan wajib yaitu satu urusan wajib pelayanan dasar yaitu urusan Pendidikan dan satu urusan wajin yaitu urusan Kebudayaan. Pada tahun 2024 urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari 7 program, 18 kegiatan dan 81 sub kegiatan. Total alokasi anggaran yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 3.17
Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase	
				Keuangan	Fisik
1	Belanja	570,848,641,069.00	56,3791,419,947.00	98,76	98,76
a	Belanja Operasi	521,382,458,031.00	514.885.206.101.00	98,75	98,75
b	Belanja Modal	49,466,183,038.00	48.906.213.846.00	98,87	98,87

Untuk lebih jelasnya alokasi anggaran dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18
Rincian Alokasi Anggaran dan Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	%
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	455,455,476,429.00	450,776,074,450.00	4,679,401,979.00	98.97
01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,895,000.00	5,554,000.00	5,341,000.00	50.98
01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,602,000.00	1,580,000.00	22,000.00	98.63
01.2.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1,602,000.00	1,580,000.00	22,000.00	98.63
01.2.01.0004.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,602,000.00	1,580,000.00	22,000.00	98.63
01.2.01.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1,602,000.00	1,580,000.00	22,000.00	98.63
01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,980,000.00	10,574,781.00	405,219.00	96.31
01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,897,000.00	3,608,000.00	5,289,000.00	40.55
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	455,137,421,949.00	450,497,421,934.00	4,640,000,015.00	98.98
01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	455,137,421,949.00	450,497,421,934.00	4,640,000,015.00	98.98
01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00
01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	%
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	47,073,480.00	46,723,480.00	350,000.00	99.26
01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,815,000.00	8,815,000.00	0.00	100.00
01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38,258,480.00	37,908,480.00	350,000.00	99.09
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127,800,000.00	116,293,055.00	11,506,945.00	91.00
01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	100.00
01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87,000,000.00	77,293,055.00	9,706,945.00	88.84
01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38,300,000.00	36,500,000.00	1,800,000.00	95.30
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105,446,000.00	89,579,200.00	15,866,800.00	84.95
01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39,190,000.00	23,649,400.00	15,540,600.00	60.35
01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50,805,000.00	50,749,800.00	55,200.00	99.89
01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,180,000.00	15,180,000.00	0.00	100.00
01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	%
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	112,591,970,040.00	110,583,732,539.00	2,008,237,501.00	98.22
02.2.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	71,189,014,843.00	70,320,986,348.00	868,028,495.00	98.78
02.2.01.0003.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1,319,628,000.00	1,303,237,000.00	16,391,000.00	98.76
02.2.01.0005.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1,100,560,000.00	1,084,149,000.00	16,411,000.00	98.51
02.2.01.0006.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2,814,580,000.00	2,799,821,000.00	14,759,000.00	99.48
02.2.01.0009.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	549,249,000.00	547,146,000.00	2,103,000.00	99.62
02.2.01.0011.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	957,420,000.00	954,046,000.00	3,374,000.00	99.65
02.2.01.0014.	Pengadaan Mebel Sekolah	1,955,668,568.00	1,933,263,500.00	22,405,068.00	98.85
02.2.01.0022.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	5,060,000,000.00	4,934,637,000.00	125,363,000.00	97.52
02.2.01.0025.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	287,821,000.00	247,514,295.00	40,306,705.00	86.00
02.2.01.0026.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	154,364,200.00	135,764,681.00	18,599,519.00	87.95
02.2.01.0027.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	616,964,800.00	569,513,657.00	47,451,143.00	92.31
02.2.01.0029.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	37,958,781,200.00	37,737,053,215.00	221,727,985.00	99.42
02.2.01.0031.	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	4,673,436,000.00	4,575,486,000.00	97,950,000.00	97.90
02.2.01.0038.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	779,120,000.00	717,227,000.00	61,893,000.00	92.06
02.2.01.0047.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	359,200,000.00	356,540,000.00	2,660,000.00	99.26

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	%
02.2.01.0048.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,482,164,075.00	1,474,805,000.00	7,359,075.00	99.50
02.2.01.0050.	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	10,080,000.00	5,250,000.00	4,830,000.00	52.08
02.2.01.0051.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	11,109,978,000.00	10,945,533,000.00	164,445,000.00	98.52
02.2.02.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	27,023,476,100.00	26,611,936,144.00	411,539,956.00	98.48
02.2.02.0004.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	518,900,000.00	517,164,200.00	1,735,800.00	99.67
02.2.02.0006.	Pembangunan Laboratorium	1,906,630,000.00	1,873,365,800.00	33,264,200.00	98.26
02.2.02.0012.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	432,200,000.00	429,543,000.00	2,657,000.00	99.39
02.2.02.0014.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2,677,580,000.00	2,543,175,405.00	134,404,595.00	94.98
02.2.02.0017.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	748,506,700.00	733,084,000.00	15,422,700.00	97.94
02.2.02.0018.	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	848,728,000.00	837,004,000.00	11,724,000.00	98.62
02.2.02.0024.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	301,260,000.00	299,355,000.00	1,905,000.00	99.37
02.2.02.0035.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	356,925,000.00	355,595,000.00	1,330,000.00	99.63
02.2.02.0038.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	298,156,000.00	246,776,210.00	51,379,790.00	82.77
02.2.02.0039.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	11,444,000.00	10,440,008.00	1,003,992.00	91.23
02.2.02.0040.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	455,680,000.00	402,177,299.00	53,502,701.00	88.26

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	%
02.2.02.0042.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	16,773,040,000.00	16,744,387,122.00	28,652,878.00	99.83
02.2.02.0051.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	316,777,100.00	269,699,100.00	47,078,000.00	85.14
02.2.02.0058.	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	9,975,000.00	8,400,000.00	1,575,000.00	84.21
02.2.02.0059.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	903,844,000.00	885,705,000.00	18,139,000.00	97.99
02.2.02.0064.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	463,830,300.00	456,065,000.00	7,765,300.00	98.33
02.2.03.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7,550,873,097.00	7,358,968,347.00	191,904,750.00	97.46
02.2.03.0002.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	967,104,497.00	962,836,309.00	4,268,188.00	99.56
02.2.03.0003.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	195,000,000.00	194,321,000.00	679,000.00	99.65
02.2.03.0007.	Pengadaan Mebel PAUD	75,000,000.00	74,814,000.00	186,000.00	99.75
02.2.03.0009.	Pengadaan Perlengkapan PAUD	229,111,600.00	214,150,600.00	14,961,000.00	93.47
02.2.03.0012.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	498,000,000.00	472,510,000.00	25,490,000.00	94.88
02.2.03.0013.	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	672,494,000.00	550,259,000.00	122,235,000.00	81.82
02.2.03.0016.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	161,052,000.00	154,055,223.00	6,996,777.00	95.66
02.2.03.0018.	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4,026,000,000.00	4,012,800,000.00	13,200,000.00	99.67
02.2.03.0019.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	31,500,000.00	30,300,000.00	1,200,000.00	96.19
02.2.03.0028.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	483,060,000.00	480,969,215.00	2,090,785.00	99.57

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	%
02.2.03.0030.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	147,550,000.00	147,127,000.00	423,000.00	99.71
02.2.04.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6,828,606,000.00	6,291,841,700.00	536,764,300.00	92.14
02.2.04.0001.	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	736,832,000.00	736,135,000.00	697,000.00	99.91
02.2.04.0010.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00
02.2.04.0011.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	280,000,000.00	197,489,000.00	82,511,000.00	70.53
02.2.04.0015.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	55,210,000.00	46,180,000.00	9,030,000.00	83.64
02.2.04.0016.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	156,788,000.00	126,147,100.00	30,640,900.00	80.46
02.2.04.0017.	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5,101,700,000.00	4,907,176,000.00	194,524,000.00	96.19
02.2.04.0042.	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	172,500,000.00	168,361,600.00	4,138,400.00	97.60
02.2.04.0047.	Pembangunan Ruang Laboratorium	45,576,000.00	30,800,000.00	14,776,000.00	67.58
02.2.04.0050.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	80,000,000.00	79,553,000.00	447,000.00	99.44
4.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	33,836,000.00	11,600,000.00	22,236,000.00	34.28
04.2.01.	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,	33,836,000.00	11,600,000.00	22,236,000.00	34.28

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	%
	PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
04.2.01.0001.	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	33,836,000.00	11,600,000.00	22,236,000.00	34.28
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1,958,758,600.00	1,714,679,594.00	244,079,006.00	92.16
02.2.01.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	177,941,800.00	163,987,604.00	13,954,196.00	92.16
02.2.01.0001.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	77,941,800.00	63,987,604.00	13,954,196.00	82.10
02.2.01.0002.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100.00
02.2.02.	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	859,316,800.00	643,663,390.00	215,653,410.00	74.90
02.2.02.0001.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	544,096,100.00	540,147,000.00	3,949,100.00	99.27
02.2.02.0002.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	315,220,700.00	103,516,390.00	211,704,310.00	32.84
02.2.03.	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	921,500,000.00	907,028,600.00	14,471,400.00	99.40
02.2.03.0002.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	220,000,000.00	218,679,600.00	1,320,400.00	99.40

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	%
02.2.03.0003.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	701,500,000.00	688,349,000.00	13,151,000.00	98.13
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	475,000,000.00	472,718,158.00	2,281,842.00	99.52
03.2.01.	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	475,000,000.00	472,718,158.00	2,281,842.00	99.52
03.2.01.0003.	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	475,000,000.00	472,718,158.00	2,281,842.00	99.52
5.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	240,600,200.00	232,615,206.00	7,984,994.00	94.41
05.2.01.	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	117,223,900.00	110,673,906.00	6,549,994.00	94.41
05.2.01.0002.	Penetapan Cagar Budaya	117,223,900.00	110,673,906.00	6,549,994.00	94.41
05.2.02.	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	123,376,300.00	121,941,300.00	1,435,000.00	98.84
05.2.02.0003.	Pemanfaatan Cagar Budaya	123,376,300.00	121,941,300.00	1,435,000.00	98.84
6.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	92,999,800.00	0.00	92,999,800.00	0.00
06.2.01.	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	92,999,800.00	0.00	92,999,800.00	0.00
06.2.01.0002.	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	92,999,800.00	0.00	92,999,800.00	0.00
	JUMLAH TOTAL	570,848,641,069.00	563,791,419,947.00	7,057,221,122.00	98.76

Realisasi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024 dari data di atas adalah sebesar Rp. **563,791,419,947,-** dari anggaran sebesar Rp. **570,848,641,069,-** dengan persentase realisasi adalah **98,76%**.

E. Tindak Lanjut Rekomendasi APIP Atas Review LKjIP Tahun 2023

Rekomendasi APIP atas evaluasi LKjIP Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	<p>Evaluasi atas Perencanaan Kinerja</p> <p>a. Melakukan pemantauan Sosialisasi tentang target Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dalam Renstra, IKU, PK dan DPA kepada seluruh unit kerja dan pegawai dan Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.</p> <p>b. Menetapkan target Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran dapat dicapai dengan kriteria sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai. - Selaras dengan RPJM/ RPJMD/Renstra - Berdasarkan relevan dengan Indikator SMART - Berdasarkan basis data yang memadai - Berdasarkan perhitungan yang logis 	<p>a. Sosialisasi tentang target Perencanaan Kinerja sudah dilaksanakan Kepada seluruh unit kerja dan pegawai melalui rapat Perencanaan Kinerja (Notulen terlampir).</p> <p>b. Penjabaran dan Penyelarasan target Perencanaan Kinerja dalam Renstra, IKU, PK dan DPA dilaksanakan secara vertikal, dari level atas ke bawah sesuai dengan Cascading Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021-2026 (terlampir) serta Penjaminan Kualitas terhadap penetapan tujuan sudah dilaksanakan pada sistem <i>spipterintegrasi.bpkp.go.id</i>.</p>
2	<p>Evaluasi atas Pengukuran Kinerja</p> <p>a. Melakukan upaya untuk melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja secara berjenjang setiap triwulan</p>	<p>a. Terdapat SOP Pengukuran Kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu</p>

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	<p>dan melakukan penyesuaian/perubahan kebijakan apabila target kinerja tidak dapat tercapai yang dibuktikan berupa rapat-rapat pemantauan di Bidang, Sub Bidang sampai level Individu yang terdokumentasi dengan baik, sehingga efisiensi atas penggunaan anggaran juga dapat dicapai.</p> <p>b. Melakukan Sosialisasi tentang hasil pengukuran kinerja kepada seluruh unit kerja dan pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan berkomitmen untuk melakukan peningkatan capaian kinerja untuk tahun berikutnya</p>	<p>upaya untuk melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja secara berjenjang (terlampir).</p> <p>b. Sudah dilaksanakannya Sosialisasi tentang hasil pengukuran kinerja kepada seluruh unit kerja dan pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Notulen terlampir).</p>
3	<p>Evaluasi atas Pelaporan Kinerja</p> <p>Agar melengkapi Dokumen Laporan Kinerja tahun berikutnya dengan menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)</p>	<p>Terdapat Analisis dan Evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional (Benchmark Kinerja) pada Dokumen Laporan Kinerja tahun 2024</p>
4	<p>Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal</p> <p>a. Melaksanakan Pemantuan Capaian Kinerja Internal sesuai dengan SOP dan dilaksanakan oleh SDM yang memadai.</p> <p>b. Menindaklanjuti hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang dilaksanakan oleh APIP terhadap rekomendasi yang belum ditindak lanjuti.</p>	<p>a. Pemantuan Capaian Kinerja Internal sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP serta memanfaatkan sistem <i>esr.menpan.go.id</i></p> <p>b. Terdapat Tindak Lanjut Rekomendasi APIP Atas Review LKjIP tahun 2023</p>

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	c. Menggunakan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang dilaksanakan oleh APIP untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja yang belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja	c. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam Penjaminan Kualitas terhadap Struktur Proses dan Pencapaian Tujuan dengan memanfaatkan sistem <i>spipterintegrasi.bpkp.go.id</i> sebagai bentuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik, sebagai sarana peningkatan kinerja instansi pemerintah terhadap capaian kinerja sebanyak 3 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja pada Tahun 2024.

Berdasarkan hasil pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Pengukuran ini berpedoman pada penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dimana terdapat 3 Sasaran Strategis dan 6 Indikator Kinerja, maka capaian indikator kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis 1 : Meningkatkan kualitas Pengembangan kebudayaan dengan indikator sasaran Persentase Pemberlakuan norma adat yang berlaku Tahun 2024 target 77,21 realiasi 0, persentase capaian 0 % dengan predikat sangat rendah.
2. Sasaran strategis 2 : Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Angka Harapan Lama Sekolah target Tahun 2024 sebesar 14,13 tahun, realisasi 13,42 tahun, persentase capaian 94,98% dengan predikat sangat tinggi.
 - b. Angka Rata-rata Lama Sekolah target Tahun 2023 sebesar 8,37 tahun, realisasi sebesar 8,13 tahun, persentase capaian 97,13% dengan predikat sangat tinggi.

3. Sasaran strategis 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja sebagai berikut:
- a. Nilai AKIP target tahun 2024 69,68 (B), realisasi adalah 75,08 (BB), persentase capaian 107,75% dengan predikat sangat tinggi.
 - b. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB), target Tahun 2024 adalah 64,17 (B), realisasi 70,81 (BB), persentase capaian 110,35% dengan predikat sangat tinggi.
 - c. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM,) target Tahun 2024 adalah 91,97, realisasi 92,78, persentase capaian 100,88% dengan prediket sangat tinggi.

Sarilamak, Februari 2025
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota

AFRI EFENDI, S.Pd, SD, MM
NIP. 196803281992101001

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN 2021 - 2026



PEMERITAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN

Jl. Raya Tanjung Pati Km.7 Kecamatan Harau Telp. (0752) 7750560 – Fax. 50291

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NOMOR : 624 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021 – 2026**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa agar tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026, diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Ketrranagn Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
5. Peraturan Pemerintah Nomo 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemeritah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Tahun 2011 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh KOTA Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 No. 118;
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 2 November 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota



INDRAWATI, S.Pd
NIP. 19621117 198207 2 002

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 420/ 624/DPK-XI/ 2021

TANGGAL : 2 November 2021

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2021 - 2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2021 – 2026**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA / DASAR PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkannya kualitas pengembangan kebudayaan	Persentase pemberlakuan norma adat yang berlaku	Persentase nagari yang memberlakukan Perda Adat dibandingkan dengan jumlah nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota	Bidang Budaya	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Jumlah penduduk usia yang bersekolah pada tahun n dibandingkan dengan jumlah penduduk usia pada tahun n	Bidang Dikdas dan Bidang PAUD/Non Formal	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai AKIP	Nilai AKIP berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat	Sekretariat	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai IRB berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat	Sekretariat	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat dilakukan oleh Perangkat Daerah	Sekretariat	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Ditetapkan di : Sarilamak
 Pada tanggal : 2 November 2021
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Lima Puluh Kota



Indrawati, S.Pd
 NIP. 19621117 198207 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Tanjung Pati KM 7 Telp.(0752) 7750560 Fax. (0752) 7750291 KodePos 26271

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AFRI EFENDI, S.Pd.SD, M.M**

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

Jabatan : Bupati Lima Puluh Kota

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sarilamak, Januari 2024

Pihak Kedua

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Pihak Pertama

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

AFRI EFENDI, S.Pd.SD, M.M
NIP. 19680328 199210 1 001

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	2	3		4	5
1	Meningkatkan kualitas Pengembangan Kebudayaan	1.1	Persentase Pemberlakuan norma adat yang berlaku	%	77,21
2	Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan Dasar	2.1	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,13
		2.2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,37
3	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	3.1	Nilai AKIP	Nilai	69,68 (B)
		3.2	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi RB	Nilai	64,17 (B)
		3.3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	91,97


No.	Program	Anggaran	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	423.371.932.332
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp.	116.686.147.172
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp.	82.682.000
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp.	1.676.643.300
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Rp.	475.000.000
Jumlah Anggaran		Rp.	542.292.404.804

Sarilamak, Januari 2024

BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO


AFRI EFENDI, S.Pd.SD, M.M
NIP. 19680328 199210 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Raya Tanjung Pati KM 7 Telp. (0752) 7750560 Fax. (0752) 7750291 KodePos 26271

RENCANA KINERJA TAHUNAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	2	3		4	5
1	Meningkatkan kualitas Pengembangan Kebudayaan	1.1	Persentase Pemberlakuan norma adat yang berlaku	%	77,21
2	Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan Dasar	2.1	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,13
		2.2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,37
3	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	3.1	Nilai AKIP	Nilai	69,68 (B)
		3.2	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi RB	Nilai	64,17 (B)
		3.3	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	91,97

Sarilamak, Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota


AFRI EFENDI, S.Pd.SD, M.M
NIP. 19680328 199210 1 001

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2024
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SIFAT TARGET	Realisasi Akhir 2023	Target Output 2024	KEGIATAN	OUTPUT				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1.	Meningkatnya kualitas Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pemberlakuan Norma Adat Yang Berlaku	100	%		77,21	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	-	-	-	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	177.941.800
							Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	-	100,00%	-	-	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	577.701.500
							Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten / Kota	-	65,26%	34,74%	-	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	921.000.000
							Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	100,00%	-	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	475.000.000
2.	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	14,50	Tahun	13,41	14,13	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	39,18%	47,63%	13,19%	-	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	73.606.479.119
							Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	39,63%	47,70%	12,67%	-	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	29.037.549.456
		Rata-rata Lama Sekolah	8,52	Tahun	8,12	8,37	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	39,78%	48,17%	12,05%	-	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.310.403.097
							Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	47,76%	46,20%	6,05%	-	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.731.715.500
							Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	30,37%	44,76%	24,87%	-	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	82.682.000
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35,39%	40,66%	23,95%	-	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	37.180.000
3.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai AKIP	A	Nilai	B	B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24,06%	32,43%	22,52%	20,99%	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	423.053.877.852
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	A	Nilai	CC	B	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100,00%	-	-	-	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	555.000
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	50,00%	50,00%	-	-	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	47.073.480
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	95,96	Nilai	80	91,97	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30,16%	40,49%	29,34%	-	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	127.800.000
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35,61%	39,96%	24,43%	-	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	105.446.000

Sarilamak, Januari 2024
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota

AFRI EFENDI, S.Pd.SD, M.M
NIP. 19680328 199210 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Tanjung Pati KM 7 Telp. (0752) 7750560 Fax. (0752) 7750291 KodePos 26271

NOTULEN RAPAT

Hari/ Tanggal : Selasa/ 8 Januari 2024
Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Kepala Dinas
Acara : Rapat Perencanaan Kinerja tahun 2024
Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Peserta : TIM Satgas SPIP dan Staf pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

Pembahasan/ Hasil :

1. Dokumen Perencanaan Kinerja disusun berpedoman kepada IKU daerah dan Sasaran Strategis pada Bab IV di Renstra.
2. Anggaran Kegiatan pada Dokumen Perencanaan Kinerja berpedoman pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024.
3. Komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan pelaporan e-Kinerja secara rutin dan riil oleh seluruh Pegawai.
4. Pelaksanaan kegiatan pada Setiap Triwulan hendaknya memperhatikan target yang telah ditetapkan serta tetap menjaga komitmen bersama dalam usaha pencapaiannya.
5. Apabila terdapat kendala yang dihadapi di lapangan maka diharapkan segera melakukan koordinasi dengan atasan langsung agar segera mendapat solusi yang tepat.

Sarilamak, 8 Januari 2024

Mengetahui,
Pimpinan Rapat

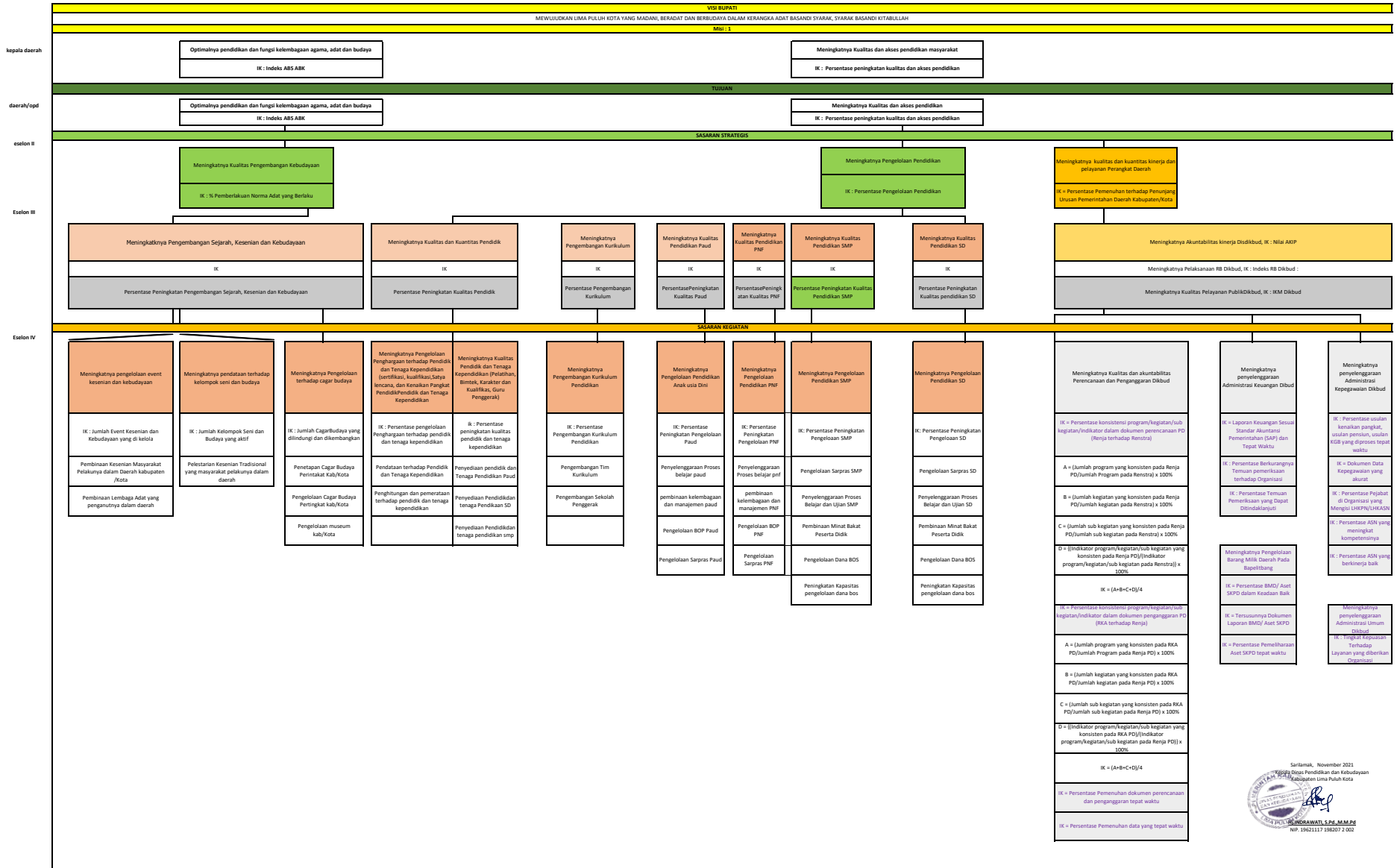


AFRI EFENDI, S.Pd, MM
NIP. 19680328 199210 1 001

Notulis

MULYANIS, ST
NIP. 197412312002122007

CASCADING DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



MONITORING RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target Output 2024	KEGIATAN	OUTPUT				RENCANA				REALISASI				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1.	Meningkatnya kualitas Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pemberlakuan Norma Adat Yang Berlaku	77,21	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	177.941.800	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	56,20%	35,96%	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	177.941.800
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	-	456.401.500	-	402.915.300	0,00%	53,11%	0,00%	46,89%	0,00%	0,00%	40,06%	34,84%	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	859.316.800
				Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten / Kota	-	821.000.000	-	100.500.000	0,00%	89,09%	0,00%	10,91%	0,00%	32,28%	17,88%	48,26%	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	921.500.000
				Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	475.000.000	-	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	68,26%	31,26%	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	475.000.000
				Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	-	117.223.900	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,41%	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	117.223.900
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	-	123.376.300	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,84%	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	123.376.300
				Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-	-	-	92.999.800	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	92.999.800
2.	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	8,37	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	22.168.719.575	28.020.459.700	8.708.918.800	12.290.916.768	31,14%	39,36%	12,23%	17,27%	0,00%	0,62%	16,37%	81,79%	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	71.189.014.843
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	8.975.668.200	10.807.562.891	2.756.141.259	4.484.103.750	33,21%	39,99%	10,20%	16,59%	0,00%	1,25%	13,57%	83,66%	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	27.023.476.100
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	2.567.443.279	1.508.285.419	2.938.828.399	536.316.000	34,00%	19,97%	38,92%	7,10%	0,00%	0,66%	68,01%	28,79%	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.550.873.097
		Angka Harapan Lama Sekolah	14,13	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	2.682.682.800	2.832.098.700	680.224.500	633.600.000	39,29%	41,47%	9,96%	9,28%	0,00%	0,00%	46,91%	45,23%	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.828.606.000
				Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.044.400	4.566.600	2.537.000	23.688.000	9,00%	13,50%	7,50%	70,01%	0,00%	0,00%	0,00%	34,28%	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	33.836.000
3.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai AKIP	69,68 (B)	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.158.000	15.118.000	7.374.000	1.530.000	35,39%	40,66%	19,83%	4,12%	0,00%	0,00%	2,29%	67,80%	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	37.180.000
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	155.395.643.478	265.873.638.781	-	33.868.139.690	34,14%	58,42%	0,00%	7,44%	16,76%	26,81%	22,94%	32,47%	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	455.137.421.949
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	64,17 (B)	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	555.000	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	555.000
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.536.740	23.536.740	-	-	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,26%	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	47.073.480
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	91,97	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56.787.000	47.065.500	23.947.500	-	44,43%	36,83%	18,74%	0,00%	0,00%	0,00%	54,11%	36,89%	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	127.800.000
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.546.500	42.135.250	25.764.250	-	35,61%	39,96%	24,43%	0,00%	0,00%	0,00%	4,84%	80,11%	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	105.446.000

Sarilamak, Januari 2025
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota

AURI EPENDI, S.Pd.SD
NIP. 19680328 199210 1 001



Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota
Periode Pelaksanaan: Tahun 2024

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Yang Mengacu Pada Sasaran RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Sasaran	Program/ Kegiatan (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program/ Kegiatan (Kepmendagri No 900.1.15-S-1317 Tahun 2023)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi (PAGU RENJA)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
									I		II		III		IV											
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14=13/5 x100%	15										
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	-	681.802.960.670	-	1.151.157.525.487	-	408.054.517.940	76.300.472.095	122.024.926.334	104.471.527.976	147.979.148.045	450.776.074.450	1.601.933.599.937	34,12								
1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan komponen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan komponen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	679.387.654	-	778.558.497	100	50.000.000	-	-	849.800	25.206.981	26.056.781	804.615.278	8,24								
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	211.242.542	7	363.611.497	2	14.000.000	-	-	-	5.554.000	5.554.000	9	369.165.497	4,36	1,75	Sub-Substansi Perencana dan Pelaporan					
		Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	33.733.796	2	29.761.400	1	3.502.000	-	-	-	1.580.000	1.580.000	3	31.341.400	3,00	0,93	Sub-Substansi Perencana dan Pelaporan					
		Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	33.733.796	2	42.978.700	1	3.502.000	-	-	-	1.580.000	1.580.000	3	44.558.700	3,00	1,32	Sub-Substansi Perencana dan Pelaporan					
		Koordinasi dan penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	33.733.796	2	40.085.900	2	3.502.000	-	-	-	1.580.000	1.580.000	4	41.665.900	2,00	1,24	Sub-Substansi Perencana dan Pelaporan					
		Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	33.733.796	2	43.354.100	1	3.502.000	-	-	-	1.580.000	1.580.000	3	44.934.100	3,00	1,33	Sub-Substansi Perencana dan Pelaporan					
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	266.200.000	3	203.767.000	1	10.980.000	-	-	849.800	9.724.981	10.574.781	214.341.781	4,00	0,81	Sub-Substansi Perencana dan Pelaporan						
		Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	67.008.929	2	54.999.900	1	11.012.000	-	-	-	3.608.000	3.608.000	3	58.607.900	3,00	0,87	Sub-Substansi Perencana dan Pelaporan					
2		Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah pemenuhan komponen administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan komponen administrasi keuangan perangkat daerah	-	673.619.912.231	-	1.144.649.876.478	100	407.679.551.137	76.300.472.095	122.024.926.334	104.396.424.119	147.775.599.386	450.497.421.934	1.595.147.298.412	5,75								
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	673.524.745.731	36	1.144.585.543.478	12	407.677.226.137	3	76.300.472.095	3	122.024.926.334	3	104.396.424.119	3	147.775.599.386	12	450.497.421.934	48	1.595.082.965.412	4,00	2,37	Sub-Substansi Keuangan dan BMD
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	21.961.500	12	14.858.000	12	465.000	-	-	-	-	-	-	12	14.858.000	1,00	0,68	Sub-Substansi Keuangan dan BMD				
		Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	21.961.500	12	14.827.000	12	465.000	-	-	-	-	-	-	12	14.827.000	1,00	0,68	Sub-Substansi Keuangan dan BMD				
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	21.961.500	12	14.974.000	12	465.000	-	-	-	-	-	-	12	14.974.000	1,00	0,68	Sub-Substansi Keuangan dan BMD				
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12	14.641.000	12	9.678.000	12	465.000	-	-	-	-	-	-	12	9.678.000	1,00	0,66	Sub-Substansi Keuangan dan BMD				
		Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	14.641.000	12	9.996.000	12	465.000	-	-	-	-	-	-	12	9.996.000	1,00	0,68	Sub-Substansi Keuangan dan BMD				
3		Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah pemenuhan komponen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan komponen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-	1.477.871.591	-	889.406.000	100	555.000	-	-	-	-	-	889.406.000	0,60								
		Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	1.477.871.591	1	889.406.000	2	555.000	-	-	-	-	-	1	889.406.000	0,50	0,60	Sub-Substansi Keuangan dan BMD					
4		Administrasi kepegawalan perangkat daerah	Jumlah pemenuhan komponen administrasi kepegawalan perangkat daerah	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan komponen administrasi kepegawalan perangkat daerah	-	467.377.323	-	475.661.000	100	1.560.000	-	-	-	-	-	475.661.000	2,31								
		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60	79.860.000	-	-	60	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Bagian Umum dan Kepegawalan	
		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22	176.357.500	28	56.616.000	22	600.000	-	-	-	-	-	28	56.616.000	1,27	0,32	Sub Bagian Umum dan Kepegawalan					
		Bimbingan teknis implementasi peraturan peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22	211.159.823	824	419.045.000	22	460.000	-	-	-	-	-	824	419.045.000	37,45	1,98	Sub Bagian Umum dan Kepegawalan					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program/ Kegiatan (Kepmendagri No 900.1.15-5-1317 Tahun 2023)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi (PAGU RENJA)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
									I		II		III		IV												
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5		Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah pemenuhan komponen administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan komponen administrasi umum perangkat daerah	-	949.576.927	-	831.741.460	100	136.769.180	-	-	-	-	-	46.723.480	-	46.723.480	-	46.723.480	-	878.464.940	-	4,05		
		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	67.512.579	93	37.776.000	12	12.520.000	-	-	-	-	-	12	8.815.000	12	8.815.000	105	46.591.000	8,75	0,69	Sub Bagian Umum dan Kepegawalan		
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	424.232.292	10	265.732.277	12	62.277.180	-	-	-	-	-	12	37.908.480	12	37.908.480	22	303.640.757	1,83	0,72	Sub Bagian Umum dan Kepegawalan		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	288.387.770	40	192.547.000	12	26.530.000	-	-	-	-	-	-	-	-	40	192.547.000	3,33	0,67	Sub Bagian Umum dan Kepegawalan			
		Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	169.444.286	22	335.686.183	12	35.442.000	-	-	-	-	-	-	-	-	22	335.686.183	1,83	1,98	Sub Bagian Umum dan Kepegawalan			
6		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pemenuhan komponen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pemenuhan komponen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Subtansi Keuangan dan BMD	
		Pengadaan mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Subtansi Keuangan dan BMD	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Subtansi Keuangan dan BMD	
7		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pemenuhan komponen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan komponen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	3.854.003.065	-	2.951.940.277	100	166.385.123	-	-	-	-	69.151.257	-	47.141.798	-	116.293.055	-	3.068.233.332	-	9,12			
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12.937.320	33	14.520.000	12	3.500.000	-	-	-	-	12	2.500.000	-	12	2.500.000	45	17.020.000	3,75	1,32	Sub Bagian Umum dan Kepegawalan		
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya manusia air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	78.236.180	37	312.387.307	12	120.010.123	-	-	-	-	6	42.651.257	6	34.641.798	12	77.293.055	49	389.680.362	4,07	4,98	Sub Bagian Umum dan Kepegawalan	
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	60.500.000	12	129.757.720	12	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	12	129.757.720	1,00	2,14	Sub Bagian Umum dan Kepegawalan			
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	3.702.329.565	30	2.495.275.250	12	99.875.000	-	-	-	-	6	24.000.000	6	12.500.000	12	36.500.000	42	2.531.775.250	3,48	0,68	Sub Bagian Umum dan Kepegawalan	
8		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pemenuhan komponen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan komponen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-	754.831.880	-	580.341.775	-	19.697.500	-	-	-	-	5.102.800	-	84.476.400	-	89.579.200	-	669.920.975	-	4,04			
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya	12	193.615.730	32	205.573.100	12	573.750	-	-	-	-	-	12	23.649.400	12	23.649.400	44	229.222.500	3,63	1,18	Sub Bagian Umum dan Kepegawalan		
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	337.341.950	21	147.955.850	12	573.750	-	-	-	-	6	5.102.800	6	45.647.000	12	50.749.800	33	198.705.650	2,75	0,59	Sub Bagian Umum dan Kepegawalan	
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	91.839.000	116	115.350.000	12	7.710.000	-	-	-	-	-	12	15.180.000	12	15.180.000	128	130.530.000	10,67	1,42	Sub Bagian Umum dan Kepegawalan		
		Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	132.035.200	11	111.462.825	12	10.840.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	111.462.825	0,92	0,84	Sub Bagian Umum dan Kepegawalan		
8	Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan	Program pengelolaan pendidikan	Persentase pengelolaan pendidikan	Program pengelolaan pendidikan	Persentase pengelolaan pendidikan	100	146.414.028.902	-	288.013.604.123	-	120.068.910.408	-	-	-	-	825.947.400	-	23.659.123.903	-	86.098.761.036	-	110.583.732.539	-	398.597.336.662	-	562,39	
9	Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan sekolah dasar	Pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan pendidikan sekolah dasar	-	91.949.019.953	-	185.658.597.123	95	73.909.070.552	-	-	-	-	439.010.300	-	11.654.715.348	-	58.227.260.700	-	70.320.986.348	-	255.979.583.471	-	78,58	
		Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	18	3.729.967.780	-	491.680.328	7	1.756.160.000	-	-	-	-	-	1	29.339.000	6	327.201.000	7	356.540.000	7	848.230.328	0,39	0,23	Sub-Subtansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas
		Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru / Kepala Sekolah / TU yang Telah Dibangun	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	7	2.840.322.056	9	2.728.280.901	7	398.990.000	-	-	0	60.187.650	3	633.870.990	3	609.178.360	7	1.303.237.000	16	4.031.517.901	2,29	1,42	Sub-Subtansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas	
		Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	31	3.632.537.116	30	4.245.672.276	15	1.051.712.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	4.245.672.276	0,97	1,17	Sub-Subtansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas		
		Pembangunan perpustakaan sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	9	4.263.557.694	9	3.352.451.960	7	850.688.000	-	-	-	-	3	537.326.440	4	546.822.560	7	1.084.149.000	16	4.436.600.960	1,78	1,04	Sub-Subtansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas	
		Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	12	8.116.079.562	139	17.621.800.757	30	7.245.507.000	-	-	-	-	1	135.679.550	29	2.664.141.450	30	2.799.821.000	169	20.421.621.757	14,06	2,52	Sub-Subtansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas	
		Pembangunan rumah dinas kepala sekolah/ guru/ penjaga sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1	2.281.577.041	-	3	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Subtansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas	
		Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi sedang/berat	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	14	4.355.189.457	39	11.180.991.250	15	8.500.623.617	-	-	0	161.075.850	7	5.195.017.970	8	5.589.439.180	15	10.945.533.000	54	22.126.524.250	3,84	5,08	Sub-Subtansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan (Kepmendagri No 050-S889 Tahun 2021)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program/ Kegiatan (Kepmendagri No 900.1.15-5-1317 Tahun 2023)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi (PAGU RENJA)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
									I		II		III		IV											
1	2	3	4	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						-	-	-	-	-	-															
10	Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan sekolah menengah pertama	Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	-	38.362.338.823	-	64.644.084.459	95	28.934.499.956	-		336.837.300	3.666.204.485		22.608.894.359	-	26.611.936.144		91.256.020.603		47,74			
	Penambahan ruang kelas sekolah baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	18	1.460.524.934	2	100.383.000	5	217.500.000	-	0	46.835.000	1	238.006.500	3	600.863.500	5	885.705.000	7	986.088.000	0,39	0,68	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas		
	Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/ TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah /TU yang Telah Dibangun	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	7	3.895.580.649	-	-	5	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas	
	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	31	1.204.519.329	8	1.265.329.600	3	399.944.000	-	0	36.835.000	1	228.176.600	1	252.152.600	3	517.164.200	11	1.782.493.800	0,35	1,48	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas		
	Pembangunan perpustakaan sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	9	605.000.000	-	-	3	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas	
	Pembangunan laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	12	3.245.848.075	16	5.471.946.100	5	3.112.100.000	-	0	40.109.000	3	992.496.937	2	840.759.863	5	1.873.365.800	21	7.345.311.900	1,75	2,26	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas		
	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	-	-	-	-	3	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas	
	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah/ guru/ penjaga sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas	
	Pembangunan fasilitas parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	1	363.000.000	-	750.428.100	2	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.428.100	-	2,07	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas	
	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6	696.559.417	20	1.410.442.100	21	870.000.000	-	-	-	-	2	33.706.000	19	395.837.000	21	429.543.000	41	1.839.985.100	6,77	2,64	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas	
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Seding/Berat	Rehabilitasi Seding/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Seding/Berat	4	2.751.621.554	-	633.946.877	20	1.305.000.000	-	1	84.794.300	7	945.979.840	12	1.512.401.265	20	2.543.175.405	20	3.177.122.282	5,00	1,15	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas		
	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Seding/Berat	Rehabilitasi Seding/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Seding/Berat	1	811.670.420	-	252.638.881	5	500.000	-	-	-	2	242.530.200	3	490.553.800	5	733.084.000	5	985.722.881	5,00	1,21	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas		
	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Seding/Berat	Rehabilitasi Seding/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Seding/Berat	3	481.277.500	-	574.586.167	3	397.750.000	-	-	-	1	232.782.900	2	604.221.100	3	837.004.000	3	1.411.590.167	1,00	2,93	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas		
	Rehabilitasi Seding/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Seding/Berat			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas	
	Rehabilitasi Seding/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Seding/Berat	Rehabilitasi Seding/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Seding/Berat	-	-	-	-	11	739.200.000	-	1	16.280.000	4	105.675.000	7	177.400.000	11	299.355.000	11	299.355.000	-	-	-	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas	
	Pengadaan mebel sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Rehabilitasi Seding/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Seding/Berat	21	1.331.000.000	1	24.595.000	1.000	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24.595.000	0,05	0,02	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas			
	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas	
	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia			-	605.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas	
	Pengadaan perlengkapan siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-	605.000.000	1.079	4.638.997.000	3	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8889	4.638.997.000	-	7,70		Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter		
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	-	57	483.204.000	57	525.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	57	483.204.000	-	-	-	-	Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	
	Perengkapan dasar buku teks peserta didik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik			57	605.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	-	605.000.000	12	1.447.603.225	5	500.000.000	-	-	3	199.400.000	2	156.195.000	5	355.595.000	17	1.803.198.225	-	2,98		Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter		
	Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1	39.024.920	-	99.814.900	59	500.000	-	-	-	-	59	8.400.000	59	8.400.000	59	108.214.900	59,00	2,77		Seksi Kurikulum dan Penilaian Dikdas		
	Penyipan dan tindak lanjut evaluasi satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Slap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi			1	26.780.785	57	190.777.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	190.777.800	56,97	7,12		Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter		
	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi / Lomba Akademik dan Non Akademik	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	4	447.262.585	-	311.297.650	200	500.000	-	-	7	8.250.000	8	10.400.000	185	228.126.210	200	246.776.210	200	558.073.860	50,00	1,25	Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	
	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2	258.916.768	31	496.425.800	60	566.750.000	-	-	-	19	3.370.008	41	7.070.000	60	10.440.008	91	506.865.808	45,64	1,96		Seksi PTK SMP	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan (Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program/ Kegiatan (Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi (PAGU RENJA)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
									I		II		III		IV													
1	2	3	4	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	-	-	-	-	-																	
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	240.002.000	1	240.967.215	1	480.969.215	1	480.969.215			Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF		
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-	-	-	-	-	1	698.987.000	-	-	-	-	-	1	147.127.000	1	147.127.000	1	147.127.000			Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF		
				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	-	-	-	-	-	-	-															
12	Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan masyarakat	Pengelolaan pendidikan non formal/ kesetaraan	Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan pendidikan anak usia dini	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan pendidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	7.606.862.254	-	12.506.682.246	95	6.857.183.400	-	-	-	-	3.209.123.570	3.088.718.130	-	6.291.841.700	-	18.798.523.946	-	255,88	-	-			
		Pembangunan gedung/ ruang kelas / ruang guru pendidikan non formal / kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Pembangunan Gedung/Ruang elas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	-	-	1	149.813.000	-	-	-	-	-	1	378.254.970	1	357.880.030	2	736.135.000	3	885.948.000	-	-	-	-	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF	
		Rehabilitasi sedang/ berat gedung/ ruang kelas / ruang guru pendidikan non formal / kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedarang/Berat	Rehabilitasi Sedarang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedarang/Berat	3	356.708.000	1	373.198.967	4	295.609.500	-	-	-	-	-	4	79.553.000	4	79.553.000	5	452.751.967	1,66	1,27	-	-	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF	
		Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF		
		Pengadaan perlengkapan pendidikan non formal / kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Pengadaan Perlengkapan Sekolah/PNF/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	21	428.708.445	19	39.738.000	30	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	39.738.000	0,90	0,09	-	-	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF	
		Penyediaan biaya personil peserta didik non formal/ kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2.252	1.627.706.520	2.979	166.208.620	1.550	420.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	####	166.208.620	1,32	0,10	-	-	Seksi Pendidikan Non Formal	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ kesetaraan yang Tersedia	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	1	99.420.000	0	98.069.000	1	197.489.000	1	197.489.000	-	-	-	-	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF
		Penyelenggaraan proses belajar non formal / kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar			21	14.567.795	1	197.762.662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	197.762.662	0,05	13,58	-	-	Seksi Pendidikan Non Formal	
		Penyapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan non formal/ kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi			2.252	11.060.610	23	1.999.480.997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	1.999.480.997	0,01	180,77	-	-	Seksi Pendidikan Non Formal	
		Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan non formal/ kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan			1	12.125.410	1	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.000.000	1,00	0,49	-	-	Sub-Substansi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal	
		Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan non formal/ kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	21	297.691.460	109	92.925.000	50	60.000.000	-	-	-	-	-	50	46.180.000	50	46.180.000	159	139.105.000	7,57	0,47	-	-	Sub-Substansi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal	
		Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah non formal/ kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	21	2.652.949	-	22.805.000	32	810.000	-	-	-	-	7	25.700.000	25	100.447.100	32	126.147.100	32	148.952.100	1,52	96,15	-	-	Seksi Pendidikan Non Formal
		Pengelolaan dana BOP sekolah non formal / kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	2.252	4.855.641.065	-	9.458.750.000	32	4.114.900.000	-	-	-	-	16	2.600.926.000	16	2.306.250.000	32	4.907.176.000	32	14.365.926.000	0,01	2,96	-	-	Seksi Pendidikan Non Formal
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dana BOP sekolah non formal / kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	-	32	600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Seksi Pendidikan Non Formal	
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	-	-	-	32	2.384.013.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Seksi Pendidikan Non Formal	
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	98.822.600	0	69.539.000	1	168.361.600	1	168.361.600			-	-	Seksi Pendidikan Non Formal	
				Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	-	-	-	-	32	630.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Seksi Pendidikan Non Formal	
				Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30.800.000	1	30.800.000	1	30.800.000			-	-	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan (Kepmendagri No 050-S889 Tahun 2021)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program/ Kegiatan (Kepmendagri No 900.1.15-5-1317 Tahun 2023)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi (PAGU RENJA)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
									I		II		III		IV											
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
III	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pendidikan	Program pendidikan dan tenaga kependidikan	Persentase pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	Program pendidikan dan tenaga kependidikan	Persentase pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	100	2.525.534.433	-	178.389.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.600.000	-	11.600.000	189.989.600	-	0,13		
13		Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal/ kesetaraan	Jumlah pemenuhan komponen pemerataan kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan non formal/ kesetaraan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pemenuhan komponen pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal/ kesetaraan	-	2.525.534.433	-	178.389.600	91	-	-	-	-	-	-	-	-	11.600.000	-	11.600.000	189.989.600	-	0,13		
		Perhitungan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal/ kesetaraan	Jumlah perhitungan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal/ kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	1.085.054.759	-	-	-	-	-	-	-	-	560	11.600.000	560	11.600.000	560	11.600.000	560,00	0,01	Seksi PTK SD, Seksi PTK SMP, Sub-Substansi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal		
		Penataan pendistribusian pendidikan dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal/ kesetaraan	Jumlah penataan pendistribusian pendidikan dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal/ kesetaraan			1	1.440.479.675	39	178.389.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	178.389.600	39,00	0,12	Seksi PTK SD, Seksi PTK SMP, Sub-Substansi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal	
IV	Meningkatkan kemajuan adat dan budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat	Program pengembangan kebudayaan	Persentase pengembangan kebudayaan	Program pengembangan kebudayaan	Persentase pengembangan kebudayaan	86	1.336.023.726	-	3.373.399.464	-	2.041.119.500	-	-	-	297.476.500	-	609.968.000	-	808.135.094	-	1.714.679.594	-	5.088.079.058	14,14		
14		Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten / kota	Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten / kota	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten / kota	-	186.108.672	-	652.712.900	73	608.756.300	-	-	-	-	-	100.000.000	-	63.987.604	-	163.987.604	-	816.700.504	8,82		
		Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1	81.711.421	11	237.405.300	8	330.244.100	-	-	-	-	-	8	63.987.604	8	63.987.604	19	301.392.904	19,28	3,69	Sub-Substansi Sejarah dan Nilai Tradisi	
		Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1	104.397.251	6	415.307.600	60	278.512.200	-	-	-	60	-	100.000.000	-	60	-	100.000.000	66	515.307.600	65,94	4,94	Sub-Substansi Sejarah dan Nilai Tradisi
15		Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah pemenuhan komponen pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan komponen pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	-	886.319.688	-	1.148.179.214	73	1.160.002.000	-	-	-	-	-	344.263.500	-	299.359.890	-	643.663.390	-	1.791.842.604	4,01		
		Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1	533.086.663	11	571.596.314	8	600.000.000	-	-	-	5	336.237.000	3	203.910.000	8	540.147.000	19	1.111.743.314	18,91	2,09	Sub-Substansi Kesenian	
		Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1	353.233.025	12	576.582.900	1	560.002.000	-	-	-	1	8.026.500	-	95.489.890	1	103.516.390	13	680.099.290	12,61	1,93	Sub-Substansi Kesenian	
16		Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten / kota	Jumlah pemenuhan komponen pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten / kota	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan komponen pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten / kota	-	263.595.366	-	1.572.507.350	73	272.361.200	-	-	-	297.476.500	-	164.804.500	-	444.747.600	-	907.028.600	-	2.479.535.950	1,51		
		Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	-	-	1	-	-	54.510.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Sub-Substansi Sejarah dan Nilai Tradisi	
		Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	1	263.595.366	3	178.516.700	150	217.851.200	-	-	-	-	43	63.050.000	107	155.629.600	150	218.679.600	153	397.196.300	153,00	1,51	Sub-Substansi Sejarah dan Nilai Tradisi
		Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	-	-	2	1.393.990.650	-	-	-	-	1	297.476.500	0	101.754.500	0	289.118.000	1	688.349.000	3	2.082.339.650	-	-	Sub-Substansi Sejarah dan Nilai Tradisi
V		Program pengembangan kesenian tradisional	Persentase pengembangan kesenian tradisional	Program pengembangan kesenian tradisional	Persentase pengembangan kesenian tradisional	89	152.911.935	-	1.142.279.725	-	650.005.000	-	-	-	-	-	324.245.158	-	148.473.000	-	472.718.158	-	1.614.997.883	6,93		
17		Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten / kota	Jumlah pemenuhan komponen pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten / kota	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan komponen pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten / kota	-	152.911.935	-	1.142.279.725	83	650.005.000	-	-	-	-	-	324.245.158	-	148.473.000	-	472.718.158	-	1.614.997.883	6,93		
		Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	1	-	99	555.691.600	-	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	555.691.600	99,32	-	Sub-Substansi Kesenian
		Standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesenian tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Substansi Kesenian	
		Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	152.911.935	7	586.588.125	40	300.005.000	-	-	-	-	27	324.245.158	-	148.473.000	40	472.718.158	47	1.059.306.283	46,99	6,93	Sub-Substansi Kesenian
VI		Program pembinaan sejarah	Persentase pembinaan sejarah	Program pembinaan sejarah	Persentase pembinaan sejarah	90	174.540.685	-	84.999.900	-	251.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.999.900	-	0,49		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan (Kepmendagri No 050-S889 Tahun 2021)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Program/ Kegiatan (Kepmendagri No 900.1.15-S-1317 Tahun 2023)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi (PAGU RENJA)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
									I		II		III		IV											
1	2	3	4	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
18		Pembinaan sejarah lokal dam 1 daerah kabupaten / kota	Jumlah pemenuhan komponen pembinaan sejarah lokal dam 1 daerah kabupaten / kota	Pembinaan sejarah lokal dam 1 daerah kabupaten / kota	Jumlah pemenuhan komponen pembinaan sejarah lokal dam 1 daerah kabupaten / kota	-	174.540.685	-	84.999.900	70	251.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.999.900	-	0,49		
		Pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal kabupaten / kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	1	174.540.685	1	84.999.900	100	251.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.999.900	1,00	0,49	Sub-Substansi Sejarah dan Nilai Tradisi	
		Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Substansi Sejarah dan Nilai Tradisi	
		Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Substansi Sejarah dan Nilai Tradisi	
VII		Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	90	333.647.636	-	444.029.102	-	741.993.000	-	-	-	-	-	-	232.615.206	-	232.615.206	-	676.644.308	-	6,98		
19		Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten / kota	Jumlah pemenuhan komponen penetapan cagar budaya peringkat kabupaten / kota	Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten / kota	Jumlah pemenuhan komponen penetapan cagar budaya peringkat kabupaten / kota	-	195.385.210	-	194.660.500	70	491.998.000	-	-	-	-	-	-	110.673.906	-	110.673.906	-	305.334.406	-	2,66		
		Pendaftaran objek diduga cagar budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Pendaftaran objek diduga cagar budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	1	79.588.210	1	5.113.900	13	171.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.113.900	1,00	0,06	Sub-Substansi Cagar Budaya dan Permuseuman
		Penetapan cagar budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Penetapan cagar budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	1	115.797.000	2	189.546.600	13	320.998.000	-	-	-	-	-	110	110.673.906	110	110.673.906	112	300.220.506	112,00	2,59	Sub-Substansi Cagar Budaya dan Permuseuman	
20		Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten / kota	Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten / kota	Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten / kota	Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten / kota	-	138.262.417	-	249.368.602	70	249.995.000	-	-	-	-	-	-	121.941.300	-	121.941.300	-	371.369.902	-	4,32		
		Perlindungan cagar budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Perlindungan cagar budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1	38.266.250	2	37.881.300	1	99.995.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	37.881.300	2,30	0,99	Sub-Substansi Cagar Budaya dan Permuseuman
		Pengembangan cagar budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub-Substansi Cagar Budaya dan Permuseuman	
		Pemanfaatan cagar budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Pemanfaatan cagar budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1	99.996.167	4	211.487.302	1	150.000.000	-	-	-	-	-	-	1	121.941.300	1	121.941.300	5	333.428.602	4,58	3,33	Sub-Substansi Cagar Budaya dan Permuseuman
VIII		Program pengelolaan permuseuman	Persentase pengelolaan permuseuman	Program pengelolaan permuseuman	Persentase pengelolaan permuseuman	90	30.250.000	-	113.046.298	-	99.999.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.046.298	-	3,74		
21		Pengelolaan museum kabupaten/kota	Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan museum kabupaten/kota	Pengelolaan museum kabupaten/kota	Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan museum kabupaten/kota	-	30.250.000	-	113.046.298	80	99.999.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.046.298	-	3,74		
		Pembinaan dan peningkatan mutu dan kapasitas sumber daya manusia permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	-	30.250.000	2	113.046.298	30	99.999.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	113.046.298	-	3,74	Sub-Substansi Cagar Budaya dan Permuseuman
JUMLAH							832.760.897.978		1.444.507.273.699		531.907.895.248		76.300.472.095		123.148.250.434		129.063.965.037		235.278.732.381		563.791.419.947		2.008.298.693.646			
Rata-rata capaian kinerja (%)																										
Predikat kinerja																										
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																										

Disusun
Sarilamak, Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

AFRI EFENDI ,S.Pd,SD, M.M
NIP. 19680328 199210 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor Standar Oprasional
Prosedur Tanggal Pembuatan
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

: 420/1.c/1/DPK-LK/I-2023
: 27 Desember 2022
: 2 Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota

RETAYANDA, S.Pd.I
NIP. 19660623 200212 1 002

Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pengukuran Kinerja

Dasar Hukum :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15)
3. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (Sop) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan pengolahan data
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Mengetahui tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan kinerja

Keterkaitan :

1. SOP Surat Keluar
2. SOP Pembuatan dan Pelaksanaan Kegiatan
3. SOP Penyusunan Laporan Kinerja

Peralatan / Perlengkapan :










1. Dokumen Renstra
2. Dokumen IKU
3. Dokumen PK, RKT, Renaksi
4. Perangkat Pengolah Data / Komputer
5. ATK



Peringatan :







Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan LAKIP tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja sesuai target yang ditetapkan.


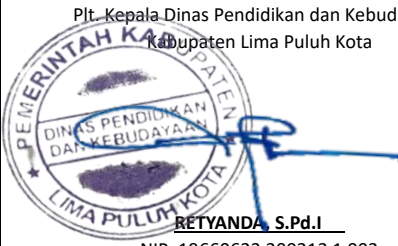
Pencatatan dan Pendataan :













Disimpan sebagai dokumen pengendalian dan evaluasi kinerja

No	Kegiatan	Kepala Dinas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
			Sekretaris Dinas	TIM	Kasubbag Perencana dan Pelaporan	Staf	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan untuk melaksanakan pengukuran kinerja						Dokumen Renstra, Struktur Organisasi	20 Menit		
2	Mengumpulkan Tim SPIP untuk merumuskan pengukuran kinerja							60 Menit		
3	Menyusun konsep pengukuran kinerja						Dokumen IKU	1 Hari	Draft Pengukuran Kinerja	
4	Menghimpun data						Draft Pengukuran Kinerja	1 Hari	Draft Pengukuran Kinerja	
5	Mengetik konsep pengukuran kinerja						Draft Pengukuran Kinerja	1 Hari	Konsep Pengukuran Kinerja	Formula Pengukuran Kinerja : 1. Analisis dan Capaian Kinerja 2. Realisasi Indikator Kinerja 3. Realisasi Anggaran 4. Data Kinerja Individu Pegawai
6	Memeriksa hasil ketikan konsep pengukuran kinerja, Jika setuju diserahkan ke Tim. Jika tidak diserahkan kepada Staf untuk diperbaiki.						Konsep Pengukuran Kinerja	60 Menit	Konsep Pengukuran Kinerja	
7	Memeriksa konsep Jika setuju diserahkan ke Sekretaris. Jika tidak diserahkan kepada Kasubag untuk diperbaiki.						Konsep Pengukuran Kinerja	60 Menit	Pengukuran Kinerja	
8	Melaksanakan pengukuran kinerja bersama Tim						Pengukuran Kinerja	2 Hari	Pengukuran Kinerja	
9	Melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas						Pengukuran Kinerja	1 Hari	Laporan	Data pengukuran digunakan untuk e-Kinerja Pegawai dan e-SAKIP

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</p>	Nomor Standar Oprasional Prosedur Tanggal Pembuatan Tanggal Efektif Disahkan Oleh	: 420/1.b/1/DPK-LK/I-2023 : 27 Desember 2022 : 2 Januari 2023 Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota  RETYANDA, S.Pd.I NIP. 19660623 200212 1 002
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja	
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) 3. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (Sop) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 4. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 5. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pengolahan data 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3. Mengetahui tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan kinerja 	
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Surat Keluar 2. SOP Pembuatan dan Pelaksanaan Kegiatan 3. SOP Penyusunan Laporan Kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Renstra 2. Dokumen IKU 3. Dokumen PK, RKT, Renaksi 4. Perangkat Pengolah Data / Komputer 5. ATK 	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan LAKIP tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja sesuai target yang ditetapkan.	Disimpan sebagai dokumen pengendalian dan pengukuran kinerja	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Bidang	Kasubbag Perencana dan Pelaporan	Staf	TIM	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan data laporan kinerja kepada subbag Perencanaan dan Pelaporan					Perjanjian Kinerja, Rencana aksi	20 Menit	Bahan Penyusunan Laporan	
2	Merekap dan Menyusun data laporan kinerja triwulan					Bahan Penyusunan Laporan	60 Menit	Bahan Penyusunan Laporan	
3	Mengolah data laporan kinerja triwulan					Bahan Penyusunan Laporan	1 Hari	Konsep data laporan kinerja triwulan	
4	Mensosialisasikan laporan kinerja triwulan kepada TIM SPIP, Jika tidak setuju, diserahkan kepada Staf untuk diperbaiki					Konsep data laporan kinerja triwulan	1 Hari	Laporan Kinerja triwulan	
5	Menerima laporan kinerja triwulan					Laporan Kinerja triwulan	60 Menit	Laporan Kinerja triwulan	
6	Mengolah 2 (dua) laporan triwulan untuk menyusun laporan semester					Laporan Kinerja triwulan	1 Hari	Konsep data laporan kinerja semesteran	
7	Mensosialisasikan laporan semesteran kepada TIM SPIP, Jika tidak setuju, diserahkan kepada Staf untuk diperbaiki					Konsep data laporan kinerja semesteran	1 Hari	Laporan Kinerja semesteran	
8	Menerima laporan kinerja semesteran					Laporan Kinerja semesteran	60 Menit	Laporan Kinerja semesteran	
9	Menyusun laporan semesteran menjadi laporan kinerja tahunan					Laporan Kinerja semesteran	2 Hari	Draft Laporan Kinerja Tahunan	
10	Mengagenda, menyimpan dan melaporkan data data kinerja					Draft Laporan Kinerja	60 Menit	Laporan Tahunan	

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</p>	Nomor Standar Oprasional Prosedur Tanggal Pembuatan Tanggal Efektif Disahkan Oleh	: 420/1.a/1/DPK-LK/I-2023 : 27 Desember 2022 : 2 Januari 2023 Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota  RETYANDA, S.Pd.I NIP. 19660623 200212 1 002
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan Kinerja	
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) 3. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (Sop) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 4. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 5. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pengolahan data 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3. Mengetahui tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan kinerja 	
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Surat Keluar 2. SOP Pembuatan dan Pelaksanaan Kegiatan 3. SOP Penyusunan Laporan Kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Renstra 2. Dokumen IKU 3. Dokumen PK, RKT, Renaksi 4. Perangkat Pengolah Data / Komputer 5. ATK 	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan LAKIP tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja sesuai target yang ditetapkan.	Disimpan sebagai dokumen pengendalian dan pengukuran kinerja	

No	Kegiatan	Kepala Dinas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
			Sekretaris Dinas	TIM	Kasubbag Perencana dan Pelaporan	Staf	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan untuk merencanakan kinerja						Dokumen Renstra, Struktur Organisasi	20 Menit	Draft Tim SPIP	
2	Membentuk Tim SPIP, memberi pengarahannya perencanaan kinerja						Draft Tim SPIP	60 Menit	Terbentuknya Tim SPIP	
3	Menyusun konsep rencana kinerja						Data Program dan Kegiatan Disdikbud	1 Hari	Draft Perencanaan Kinerja	
4	Menghimpun konsep rencana kinerja						Draft Perencanaan Kinerja	1 Hari	Draft Perencanaan Kinerja	
5	Mengetik konsep rencana kinerja						Draft Perencanaan Kinerja	2 Hari	Konsep Perencanaan Kinerja	Melalui Sistem https://sipd-ri.kemendagri.go.id/
6	Memeriksa hasil ketikan konsep rencana kinerja, Jika setuju diserahkan ke Tim. Jika tidak diserahkan kepada Staf untuk diperbaiki.						Konsep Perencanaan Kinerja	60 Menit	Dokumen Perencanaan Kinerja	
7	Memeriksa rencana kinerja, Jika setuju diserahkan ke Sekretaris. Jika tidak diserahkan kepada Kasubag untuk diperbaiki.						Dokumen Perencanaan Kinerja	60 Menit	Dokumen Perencanaan Kinerja	
8	Memeriksa rencana kinerja, memberi paraf						Dokumen Perencanaan Kinerja	60 Menit	Dokumen Perencanaan Kinerja	
9	Memberi tanda tangan						Dokumen Perencanaan Kinerja	1 Hari	Dokumen Perencanaan Kinerja yang sudah ditandatangani	
10	Memerintahkan Kasubbag untuk menggandakan dan pendistribusian						Dokumen Perencanaan Kinerja yang sudah ditandatangani	10 Menit	Dokumen Perencanaan Kinerja yang sudah ditandatangani	SOP Surat Keluar
11	Memerintahkan Staf untuk menggandakan dan mengagenda serta pendistribusian						Dokumen Perencanaan Kinerja yang sudah ditandatangani	10 Menit		
12	Menggandakan, mengagenda serta pendistribusian							1 Hari	Bukti pengiriman	



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Tanjung Pati KM 7 Telp. (0752) 7750560 Fax. (0752) 7750291 KodePos 26271

NOTULEN RAPAT

Hari/ Tanggal : Senin/ 3 Juni 2024
Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Kepala Dinas
Acara : Rapat Evaluasi dan Koordinasi atas Laporan Hasil Evaluasi
LKJIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024
Pimpinan Rapat : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Peserta : TIM Satgas SPIP dan Staf pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

Pembahasan/ Hasil :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menyelesaikan seluruh laporan, baik laporan pertanggungjawaban, Laporan Renja, LKPJ, maupun LKJIP Tahun 2023. Pelaporan sudah diselesaikan tepat pada waktunya.
2. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 700.1.2.1/104/INSP-LK/LHP/2024 tanggal 27 Mei 2024. Adapun hasil evaluasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 memperoleh nilai **75,08** kategori **BB** dengan pengertian **Sangat Baik**, dengan uraian nilai sebagai berikut :
 - a) Perencanaan Kinerja : 25,52
 - b) Pengukuran Kinerja : 20,05
 - c) Pelaporan Kinerja : 13,63
 - d) Evaluasi Internal : 15,88
3. Rekomendasi Tindak Lanjut dari Inspektorat yang perlu dipenuhi antara lain :
 - A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja
 - a) Melakukan pemantauan Sosialisasi tentang target Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dalam Renstra, IKU, PK dan DPA kepada seluruh unit kerja dan pegawai dan Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
 - b) Menetapkan target Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran dapat dicapai dengan kriteria sebagai berikut :

- Menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai.
- Berdasarkan relevan dengan Indikator SMART
- Berdasarkan basis data yang memadai
- Berdasarkan perhitungan yang logis

B. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

- a) Melakukan upaya untuk melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja secara berjenjang setiap triwulan dan melakukan penyesuaian/perubahan kebijakan apabila target kinerja tidak dapat tercapai yang dibuktikan berupa rapat-rapat pemantauan di Bidang, Sub Bidang sampai level Individu yang terdokumentasi dengan baik, sehingga efisiensi atas penggunaan anggaran juga dapat dicapai.
- b) Melakukan Sosialisasi tentang hasil pengukuran kinerja kepada seluruh unit kerja dan pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan berkomitmen untuk melakukan peningkatan capaian kinerja untuk tahun berikutnya.

C. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

- a) Agar melengkapi Dokumen Laporan Kinerja tahun berikutnya dengan menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).

D. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

- a) Melaksanakan Pemantuan Capaian Kinerja Internal sesuai dengan SOP dan dilaksanakan oleh SDM yang memadai.
- b) Menindaklanjuti hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang dilaksanakan oleh APIP terhadap rekomendasi yang belum ditindak lanjuti.
- c) Menggunakan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang dilaksanakan oleh APIP untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja yang belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja.

4. Arahan Kepala Dinas :

- a) Pemantauan kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan, dan tahunan;
- b) Pemantauan dan pengukuran capaian dan realisasi dengan melihat target yang sudah ada di dokumen Renstra dan Renja serta penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Program, Indikator Kegiatan dan Indikator Sub. Kegiatan;
- c) Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil

analisis terhadap pengukuran kinerja, hal tersebut juga yang masih terus diusahakan untuk dilaksanakan;

- d) Peningkatan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka penyelarasan target- target kinerja dan Indikator Kinerja Utama, Indikator Program, Indikator Kegiatan dan Indikator Sub. Kegiatan;
- e) Penguatan koordinasi dan komunikasi internal seluruh pejabat struktural dan staf dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan melihat evaluasi Capaian LKjIP Tahun 2023 sebagai dasar perbaikan Nilai LKjIP Tahun 2024.
- f) Pimpinan memberikan apresiasi kepada seluruh Pejabat dan Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2023 dan dianggap telah berjalan lancar, baik serta mampu untuk menunjukkan eksistensi jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada Masyarakat.

Sarilamak, 3 Juni 2024

Notulis



MULYANIS, ST

NIP. 197412312002122007

Mengetahui,
Pimpinan Rapat



APRIEFENDI, S.Pd, MM

NIP. 19680328 199210 1 001

Screenshoot Laman E-Sakip review (*esr.menpan.go.id*) Tahun 2024

Dashboard

FEATURES:

Dokumen SAKIP

Renstra

IKU

Renja/RKT

Perjanjian Kinerja

Rencana Aksi

Laporan Kinerja

DPA

Pohon Kinerja & Cascading

LHE AKIP Internal

TL LHE AKIP Internal

Laporan Monev Renaksi

Lainnya

FAQ

Dashboard

Showing 10 entries


Search:

OPD	Renstra	IKU	Renja/RKT	PK	Rencana Aksi	Laporan Kinerja	DPA	Pohon Kinerja & Cascading	LHE AKIP Internal	TL LHE AKIP Internal	Laporan Monev Renaksi	Lainnya
Dinas Pangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Dinas Pemadam Kebakaran	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Dinas Perhubungan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

Showing 11 to 20 of 44 entries

Previous12345Next

Screenshoot Laman E-Integrity (*spipterintegrasi.bpkp.go.id*) Tahun 2024

 e-INTEGRITY
PEMDA

Dashboard

TRANSAKSI

Penilaian Mandiri

Home / Penilaian / Persiapan / Detail

Disdikbud

PDKLPK

Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun : 2024

Anggaran : Rp. 1,313,062,181.682.00

Informasi pimpinan belum ada - Telp belum diisi

Alamat instansi belum diisi

Status : Penilaian Mandiri

Kesiapan Penjamin Kualitas

0/3

0 %

Nama Satuan Kerja / OPD:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Monitoring

PENETAPAN TUJUAN

STRUKTUR PROSES

PENCAPAIAN TUJUAN

PENETAPAN TUJUAN

Refresh Data

KODE	JENIS SASARAN	SASARAN INDIKATOR	TARGET	SASARAN STRATEGIS TEPAT	IK TEPAT DAN BAIK	TARGET KINERJA BAIK	KETERKAITAN DENGAN SASARAN DIATASNYA
1	Sasaran Pemda	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan Masyarakat		✓			
1-2		Rata - Rata Lama Sekolah	8.37 Angka		✓	✓	
1-1		Harapan Lama Sekolah	14.13 Angka		✓	✓	